

**PENGARUH RELIGIUSITAS, PERSEPSI TENTANG PELAKSANAAN SANKSI  
DENDA, TINGKAT PENGHASILAN, DAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP  
KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kecamatan Gunungpati)

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1)

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh:

**DIANA RESTI KUSUMAWARDANI**

**1905046029**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Diana Resti Kusumawardani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini. Saya kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Diana Resti Kusumawardani

NIM : 1905046029

Jurusan : Akuntansi Syariah

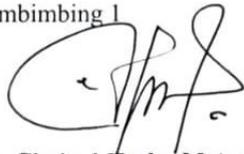
Judul Skripsi : **PENGARUH RELIGIUSITAS, PERSEPSI WAJIB PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN, DAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PBB (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK DI KECAMATAN GUNUNGPATI)**

Demikian ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, April 2023

Pembimbing 1



Dr. Choirul Huda, M.Ag.

NIP. 1976010920050110

Pembimbing 2



Arif Efendi, S.E., M.Sc

NIP. 1985052620150310

## LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 (024) 7608454 Fax. 7608454 Semarang 50185  
Website: <http://febi.walisongo.ac.id>

### PENGESAHAN

Nama : Diana Resti Kusumawardani  
NIM : 1905046029  
Judul : **PENGARUH RELIGIUSITAS, PERSEPSI TENTANG PELAKSANAAN SANKSI DENDA, TINGKAT PENGHASILAN, DAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kecamatan Gunungpati)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

**16 Juni 2023**

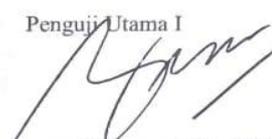
Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 16 Juni 2023

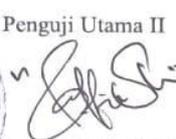
### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang  
  
Riska Wijayanti, S.H., M.H  
NIP. 199304082019032019

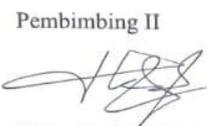
Sekretaris Sidang  
  
Choirul Huda, M.Ag  
NIP. 197601092005011002

Penguji Utama I  
  
Rahman El Junusi, SE., MM  
NIP. 196911182000031001



Penguji Utama II  
  
Septiana Na'afi, S.H.I., M.S.I  
NIP: 198909242019032018

Pembimbing I  
  
Choirul Huda, M.Ag  
NIP. 197601092005011002

Pembimbing II  
  
Arif Afendi, SE, M.Sc  
NIP. 198505262015031002

## MOTTO

(Q.S Ali-Imron : 139)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.”

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Orang tuaku tersayang, Bapak Ahmad Munta'an dan Ibu Tri Suranti yang telah sepenuhnya membesarkan dan mengasahi saya dengan setulus hati. Terima kasih selalu memberikan semangat serta dukungan moril dan juga materiil yang tak terhingga. Segala doa baik dari bapak dan ibu insyaallah yang akan mengantarkan pada kesuksesan anak-anaknya.
2. Untuk adikku yang manis Wulan Dwi Lestari. Terimakasih atas segala support dan semangatnya dalam setiap langkahku untuk menimba ilmu, terimakasih juga telah menjadi warna yang menemani hari-hariku saat dirumah. Semoga kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti dan membanggakan bagi kedua orang tua.
3. Untuk sahabat-sahabatku tercinta, Fitri Siami dan Kusriyani. Terimakasih sudah memberikan semangat dan selalu memberikan motivasi kepadaku, terimakasih juga sudah setia menemaniku dan bersedia menjadi tempatku untuk bercanda dan berkeluh kesah semasa menyelesaikan skripsi ini.
4. Sobat-sobat tersayangku di perkuliahan. Tian Widarti, Jhela Purnamasari, Febyana Rahmawati, Debora Ananda, Putri Nurischa, dan Zuliani Saputri. Terimakasih banyak atas segala support dan dukungan kalian yang sangat berarti. Terimakasih juga sudah kebersamai dan memberikan banyak momen bagiku dari awal perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Sobat-sobatku "Since 2015", Laily Nur Assyifa dan Vela Putri Mulyanda. Terimakasih telah memberikan support dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman Kobi angkatan 2019, terimakasih telah berproses bersama dan selalu mendukung penulis.

7. Teman-teman Nusantaraku AKS-A 19 yang telah menjadi keluarga sekaligus sahabat, terimakasih telah mendukung penulis.
8. Teman-teman terkece KKN Reguler Posko 13, terimakasih telah memberikan keseruan dimasa KKN penulis. Terimakasih juga telah mendukung penulis.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, terkecuali beberapa informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, Mei 2023



Deklarator

Diana Resti Kusumawardani

NIM. 1905046029

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan bagian penting dalam skripsi karena pada dasarnya banyak penggunaan istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga, dan lain sebagainya yang tulisan aslinya menggunakan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu panduan transliterasi sebagai berikut:

#### A. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Berdasarkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lainnya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut adalah daftar huruf Arab yang dimaksud beserta transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	za (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab seperti vokal dalam bahasa Indonesia. Vokal tersebut terdiri atas vokal tunggal (monoflog) atau vokal rangkap (diftong). Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan vokal monoflog dan vokal diftong.

### a. Vokal tunggal (monoflog)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b. Vokal rangkap (diftong)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan ya'	ai	a,i
... وُ	Fathah dan wau	au	a,u

**C. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid adalah harakat yang dijadikan sebagai tanda baca. Dalam tulisan Arab, syaddah dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini lambang tanda syaddah disimbolkan seperti huruf w yang terletak diatas huruf Arab.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- مَدَّ madda

**D. Ta' Marbutah**

Ta marbutah merupakan varian dari huruf *ta*. Penulisan ta marbutah tidak dijumpai diawal kata, melainkan mirip dengan huruf *ha* yang dijumpai diakhir kata. Namun apabila ta marbutah berada ditengah kata maka pelafalannya seperti huruf *ta* biasa. Pedoman untuk ta marbutah adalah sebagai berikut:

1. Ta' marbutah hidup atau yang biasanya berharakat fathah, kasroh, dan dlommah, maka ditransliterasikan sebagai "t".
2. Ta' marbutah yang mati atau yang berharakat sukun, maka ditransliterasikan sebagai "h".
3. Pada kata yang berakhiran dengan ta ' marbutah diikuti dengan kata yang memakai kata *al* serta bacaan dari keduanya terpisah, maka ta' marburah itu ditransliterasi sebagai "h".

Contoh:

- بَرَاكَةٌ dibaca barakah, dikarenakan huruf ta berada diakhir kata.
- بَرَكَاتِهِ dibaca barakatuh, karena huruf ta berada ditengah kata.

## E. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan Arab kata sandang dilambangkan dengan huruf *al* namun jika ditransliterasi kata sandang dapat dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dilafalkan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah maka ditransliterasi sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti serta dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الرَّجُلُ ar-rajulu

## F. Maddah

*Maddah* atau yang biasa disebut vokal panjang memiliki lambang berupa harakat dan huruf, maka ditransliterasikan berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

## G. Tajwid

Bagi seseorang yang ingin melafalkan bacaannya dengan fasih, maka dapat menggunakan pedoman transliterasi ini karena memiliki sumber yang sama seperti pedoman dalam Ilmu Tajwid. Maka dari itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Akan tetapi hal itu berlaku bagi hamzah yang letaknya ditengah atau diakhir kata. Sementara hamzah yang letaknya berada diawal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## ABSTRAK

Dalam suatu negara, arti penting pajak bukan hanya sekedar menjadi sumber penerimaan yang melancarkan pembangunan nasional saja, tetapi juga sebagai sumber utama perbelanjaan pemerintah. Penerimaan pajak sangat penting untuk menunjang kegiatan ekonomi negara. Namun pelaksanaan perpajakan di Indonesia seringkali mengalami berbagai kendala diantaranya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan tidak konsisten, lemahnya penegakan hukum tentang sanksi denda terhadap pelanggaran perpajakan, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda, tingkat penghasilan, dan pemutihan pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak di Kecamatan Gunungpati. Pengambilan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel dari populasinya yang berjumlah 53.964. Metode analisis dan uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB, persepsi wajib pajak berpengaruh negatif terhadap keberhasilan penerimaan PBB, tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB, dan pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB

**Kata Kunci : Religiusitas, Persepsi Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Pemutihan Pajak**

## ABSTRACT

*In a country, the importance of taxes is not only a source of revenue that launches national development, but also as the main source of government spending. Tax revenue is very important to support the country's economic activities. However, the implementation of taxation in Indonesia often experiences various obstacles including inconsistent laws and regulations governing taxation, weak law enforcement regarding fines for tax violations, and lack of awareness from the public to pay taxes.*

*This study aims to examine the effect of religiosity, taxpayer perceptions of the implementation of fines, income levels, and tax bleaching on the success of PBB revenue. The type of research used is quantitative research with primary data obtained from distributing questionnaires to taxpayers in Gunungpati District. Sampling in this study was 100 samples from the population of 53,964. The method of analysis and hypothesis testing in this study used multiple linear regression.*

*The results of this study indicate that religiosity has a positive effect on the success of PBB revenue, taxpayer perceptions have a negative effect on the success of PBB revenue, income level has a positive effect on the success of PBB revenue, and tax bleaching has a positive effect on the success of PBB revenue.*

***Keywords: Religiosity, Taxpayer Perception, Income Level, and Tax Bleaching***

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “PENGARUH RELIGIUSITAS, PERSEPSI TENTANG PELAKSANAAN SANKSI DENDA, TINGKAT PENGHASILAN, DAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kecamatan Gunungpati)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., A.Kt. selaku Kepala Prodi Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, S.E., M.Si., SAS selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Bapak Dr. Choirul Huda, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Arif Afendi, S.E.,M.Sc selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Warno, S.E., M.Si., SAS selaku Wali Dosen yang telah memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di universitas.
6. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis

7. Orang tua saya Bapak Ahmad Munta'an dan Ibu Tri Suranti yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, dukungan, moril serta materil.
8. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dan Kantor Kecamatan Gunungpati yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Sahabat-sahabat serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan adanya kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis sendiri serta bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, April 2023

Penulis

Diana Resti Kusumawardani

NIM. 1905046029

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1 Teori Atribusi .....	10
2.2 Pajak Bumi dan Bangunan .....	12
2.2.1 Pengertian .....	12
2.2.2 Dasar Hukum .....	12
2.2.3 Objek dan Pengecualian PBB .....	12
2.2.4 Subjek Pajak PBB .....	13
2.2.5 Unsur Dalam Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan .....	14
2.3 Keberhasilan Penerimaan PBB .....	17
2.4 Religiusitas .....	18
2.5 Persepsi Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda .....	19
2.6 Tingkat Penghasilan .....	19
2.7 Pemutihan Pajak .....	21
2.8 Penelitian Terdahulu .....	22
2.9 Rumusan Hipotesis .....	26

2.9.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB ...	26
2.9.2 Pengaruh Persepsi Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB .....	28
2.9.3 Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB .....	29
2.9.4 Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB .....	30
2.10 Kerangka Berfikir .....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Populasi dan Sampel .....	33
3.3 Pengukuran Variabel.....	34
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	35
3.5 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6 Teknik Analisis Data .....	37
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	37
3.6.2 Uji Validitas .....	38
3.6.3 Uji Reliabilitas.....	38
3.6.4 Uji Asumsi Klasik .....	38
3.6.4.1 Uji Normalitas .....	38
3.6.4.2 Uji Multikolinieritas .....	39
3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas .....	39
3.6.5 Pengujian Hipotesis .....	40
3.6.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	40
3.6.5.2 Uji Koefisien Regresi Parsial .....	41
3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi.....	41
3.6.5.4 Uji F-Statistik .....	42
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
4.1.1 Sejarah Kecamatan Gunungpati .....	43
4.1.2 Visi dan Misi .....	43
4.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Gunungpati .....	44
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data .....	45
4.2.1 Jenis Kelamin Responden.....	45
4.2.2 Usia Responden .....	46
4.2.3 Pendidikan Responden .....	46
4.2.4 Pekerjaan Responden.....	47
4.3 Analisis Statistik Deskriptif.....	48
4.4 Analisis Data .....	49
4.4.1 Uji Validitas .....	49
4.4.2 Uji Reliabilitas .....	50

4.5 Uji Asumsi Klasik .....	51
4.5.1 Uji Normalitas .....	51
4.5.2 Uji Multikolinieritas .....	53
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas .....	53
4.6 Uji Hipotesis .....	55
4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	55
4.6.2 Uji Koefisien Regresi Parsial .....	57
4.6.3 Uji Koefisien Determinasi .....	59
4.6.4 Uji F-Statistik .....	59
4.7 Pembahasan Penelitian .....	60
4.7.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Keberhasilan PBB.....	60
4.7.2 Pengaruh Persepsi WP Terhadap Keberhasilan PBB.....	61
4.7.3 Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Keberhasilan PBB .....	62
4.7.4 Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Keberhasilan PBB .....	63
 BAB V PENUTUP .....	 65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran .....	66
 DAFTAR PUSTAKA .....	 67
 LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	 71
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	 96

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PBB Kota Semarang .....	3
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Gunungpati .....	4
Tabel 1.3 Daftar Realisasi Penerimaan PBB Kota Semarang .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 3.1 Skor Skala Likert .....	35
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	35
Tabel 4.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia .....	46
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	46
Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	47
Tabel 4.5 Uji Statistik Deskriptif .....	48
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	50
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas .....	51
Tabel 4.8 Uji <i>One-Sampel Kolmogorov Smirnov</i> .....	52
Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas.....	53
Tabel 4.10 Uji Glejser .....	55
Tabel 4.11 Uji Regresi Linier Berganda .....	56
Tabel 4.12 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) .....	57
Tabe 4.13 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	59
Tabel 4.14 Uji Simultan (Uji F) .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Penerimaan PBB Kota Semarang Tahun 2020-2022.....	2
Gambar 2. Kerangka Berfikir.....	32
Gambar 3. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang .....	44
Gambar 4. Grafik Normalitas Probability Plot .....	52
Gambar 5. Grafik Scatter Plot.....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	71
Lampiran 2 Tabulasi Data .....	74
Lampiran 3 Hasil Output SPSS_Uji Statistik Deskriptif .....	86
Lampiran 4 Hasil Output SPSS_Uji Validitas .....	86
Lampiran 5 Hasil Output SPSS_Uji Reliabilitas .....	89
Lampiran 6 Hasil Output SPSS_Uji Normalitas.....	90
Lampiran 7 Hasil Output SPSS_Uji Multikolinieritas.....	91
Lampiran 8 Hasil Output SPSS_Uji Heteroskedastisitas.....	91
Lampiran 9 Hasil Output SPSS_Uji Regresi Linier Berganda .....	92
Lampiran 10 Hasil Output SPSS_Uji Koefisien Regresi Parsial (uji t).....	92
Lampiran 11 Hasil Output SPSS_Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	93
Lampiran 12 Hasil Output SPSS_Uji Simultan (uji F) .....	93
Lampiran 13 Dokumentasi.....	93

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional menjadi upaya penting pemerintah demi memajukan kesejahteraan rakyat. Dapat dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional salah satunya berasal dari penerimaan negara. Sebagaimana di Indonesia yang sebagian besar mengandalkan pembiayaan pembangunannya melalui penerimaan pajak<sup>1</sup>. Pemaknaan pajak secara umum adalah suatu bentuk partisipasi wajib warga negara kepada negaranya dengan sifatnya yang memaksa berdasarkan Undang-Undang. Ketika melakukan kewajiban pajak seseorang tidak secara langsung memperoleh imbalan, akan tetapi pajak tersebut dimanfaatkan untuk keperluan negara demi tercapainya kemaslahatan dan kemakmuran rakyat<sup>2</sup>. Esensi pajak bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan negara demi kelancaran pembangunan nasional saja, tetapi juga sebagai sumber utama perbelanjaan pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara<sup>3</sup>. Maka diperlukan adanya sinergitas antara pemerintah dengan seluruh masyarakat untuk bekerja keras sesuai bidangnya masing-masing, sehingga setiap individu dapat memahami arti penting pajak dalam keberhasilan suatu pemerintahan.

Pelaksanaan perpajakan di Indonesia seringkali mengalami berbagai kendala. Kendala yang terjadi diantaranya; aturan hukum yang belum konsisten tentang pelaksanaan sanksi pidana pelanggaran pajak, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak pusat, lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan kepatuhan wajib pajak rendah, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat<sup>4</sup>. Upaya Pemerintah terus digencarkan untuk menambah pemasukan kas negara dari pungutan pajak. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah membagi pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Ada dua macam pembagian pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah yang dibagi berdasarkan lembaga pemungutannya. Pajak pusat

---

<sup>1</sup> Ashabul Kahpi, 'Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak', *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 20.1 (2020), 43 <<https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i1.14190>>.

<sup>2</sup> Ibnu Muttaqin, 'Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, SPPT, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten', *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10.2 (2018), 218–31 <<https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.83>>.

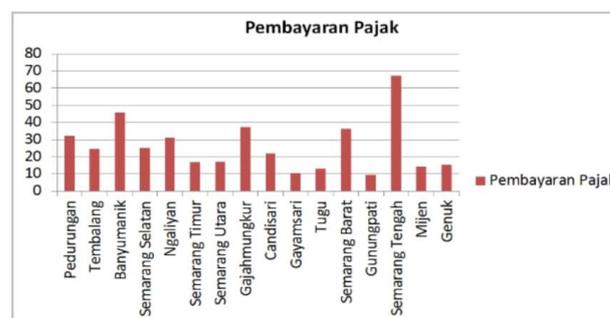
<sup>3</sup> Ali Murtadho, 'Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2013), 33–50 <<https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759>>.

<sup>4</sup> Ashabul Kahpi, Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak, p. 44.

dipungut secara langsung oleh pemerintah negara yang dananya dipakai untuk membiayai kebutuhan negara. Pajak yang termasuk pajak pusat seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Bea Materai, sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dibawah pengawasan dari pemerintah negara. Tujuannya untuk mendanai kebutuhan tiap-tiap daerah, seperti pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak atas reklame. Dari sekian jenis pajak daerah tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan dirasa paling besar pengaruhnya karena penerimaannya secara langsung disalurkan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Menurut Munawir, PBB termasuk jenis pajak langsung yang pungutannya dibawah komando pemerintah pusat, tetapi guna memenuhi kebutuhan di daerah tersebut maka perolehannya disalurkan langsung ke daerah yang bersangkutan. Artinya dari hasil perolehan pajak tersebut sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah<sup>5</sup>. Adapun ketentuan objek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan pajak, dan teknis pemungutan sepenuhnya yang mengatur adalah Pemerintah Pusat. Berdasarkan pernyataan tersebut Pemerintah Daerah tidak ikut terlibat dalam menetapkan ketentuan tersebut. Pemerintah Daerah hanya berperan mendukung pelaksanaan pajak PBB yang dibantu oleh perangkat daerah.

Pemerintah telah melakukan reformasi pajak dengan harapan mampu menambah perolehan pajak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sektor ekonomi, penerimaan pajak PBB kota Semarang mengalami penurunan di tahun 2021, sedangkan penerimaan PBB mulai membaik di tahun 2022. Berikut adalah grafik dan tabel penerimaan Pajak PBB kota Semarang tahun 2020-2021:

**Gambar 1. Grafik Penerimaan PBB Kota Semarang Tahun 2020-2022**



<sup>5</sup> Ibnu Muttaqin, Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, SPPT, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari, p. 78.

**Tabel 1.1****Daftar Realisasi Penerimaan PBB Kota Semarang**

KECAMATAN	TAHUN		
	2020	2021	2022
Gayamsari	11.552.347.583	11.258.033.229	12.973.277.823
Candisari	24.687.520.917	23.748.578.031	28.901.048.101
Gajahmungkur	42.687.037.667	45.083.100.571	51.020.030.401
Pedurungan	36.471.977.070	34.318.502.937	41.762.962.682
Tembalang	27.124.026.380	25.024.741.364	29.883.322.276
Banyumanik	53.379.545.291	54.220.120.397	64.301.623.163
Ngaliyan	41.089.430.703	37.160.889.668	46.216.141.892
Semarang Tengah	77.710.027.965	75.788.666.333	94.492.297.796
Semarang Utara	16.228.513.262	20.202.417.368	21.948.925.978
Semarang Timur	18.595.834.429	17.905.101.866	22.293.507.148
Semarang Selatan	27.496.699.960	27.370.769.892	33.583.959.467
Semarang Barat	43.181.067.775	45.171.919.165	51.536.000.477
Genuk	16.001.129.686	14.941.889.763	18.998.288.917
Gunungpati	11.781.724.953	10.832.452.990	13.305.553.812
Mijen	16.071.167.099	16.226.331.311	18.759.279.287
Tugu	16.108.296.902	16.871.245.087	16.923.232.773
<b>Jumlah</b>	<b>480.166.347.642</b>	<b>476.124.759.972</b>	<b>566.899.451.993</b>

Sumber: Arsip kantor Bapenda Kota Semarang

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa penerimaan PBB kota Semarang mengalami penerimaan secara fluktuatif. Pada tahun 2020 penerimaan tercatat sebesar Rp. 480 miliar dan mengalami penurunan sebesar Rp. 4,04 miliar di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 penerimaan PBB mengalami peningkatan sebesar Rp. 90,77 miliar dari tahun sebelumnya.

Lokasi yang akan penulis jadikan objek penelitian yaitu di wilayah Gunungpati kota Semarang. Luas wilayah Gunungpati tercatat sebesar 5.399.085 hektar yang wilayahnya terbagi menjadi 16 kelurahan, 97 RW dan 501 RT. Pengelolaan PBB di kecamatan Gunungpati diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Dari unit operasionalnya, Bapenda menunjuk 4 titik sebagai pos pelayanan PBB. Berdasarkan pembagian wilayahnya, kecamatan Gunungpati menjadi daerah yang dibawah oleh Pos Pelayanan Pajak Daerah IV yang lokasinya berada di Jalan Prof. Sudarto Nomor 16. Tujuan dengan adanya Pos Pelayanan Pajak Daerah ini diharapkan memudahkan Bapenda untuk menjangkau masyarakat serta membantu melayani masalah perpajakan.

Diketahui pada tabel 1.1 diatas, Gunungpati termasuk wilayah dengan tingkat realisasi penerimaan pajak PBB terendah di Kota Semarang. Berdasarkan analisis di lapangan, faktor

penyebab rendahnya penerimaan PBB diantaranya; kurang/tidak sadarnya masyarakat akan kewajiban membayar PBB dan malas untuk mengurus karena prosedurnya dianggap berbelit-belit. Selain itu, munculnya pandemi Covid-19 turut mempengaruhi tingkat penghasilan masyarakat Gunungpati. Hal ini berdampak pada penghasilan masyarakat yang tidak menentu sehingga menimbulkan tunggakan dalam membayar pajak. Tidak hanya itu, masyarakat Gunungpati yang berprofesi sebagai petani dengan luas tanah yang besar seringkali keberatan untuk membayar pajak. Tidak sedikit masyarakat yang berpendapat bahwa jika petani memiliki tanah dan bangunan yang luas, maka penghasilan yang diterimanya juga besar. Ternyata pendapatan keluarga tidak dapat diukur dari seberapa luasnya tanah yang dimiliki sebagai parameter rumah tangga.

Adapun data realisasi perolehan PBB di Kecamatan Gunungpati pada periode 2020-2022 tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2**

**Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Gunungpati**

No	Tahun	Target Penerimaan PBB	Realisasi PBB	Selisih
1.	2020	17.888.197.728	11.781.724.953	(6.106.472.775)
2.	2021	18.048.166.027	10.832.452.990	(7.215.713.037)
3.	2022	22.010.799.376	13.305.553.812	(8.705.245.564)

Sumber: Arsip kantor Bapenda Kota Semarang

Seringkali target pajak yang ditetapkan meleset dari realisasi penerimaannya. Pemerintah telah menetapkan target setiap tahunnya, akan tetapi penerimaannya seringkali gagal memenuhi target. Penetapan target tersebut juga ditimbang berdasarkan kebutuhan keuangan negara yang pembiayaannya berasal dari masyarakat. Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa antara realisasi penerimaan PBB dan targetnya masih jauh dari prediksi yang diperkirakan. Diketahui jumlah penerimaan PBB pada tahun 2020-2022 mengalami penerimaan secara fluktuatif. Pada tahun 2020 penerimaan PBB terealisasi sebesar Rp. 11,78 miliar. Kemudian pada tahun 2021 penerimaan PBB terealisasi sebesar Rp. 10,83 miliar dan di tahun 2022 penerimaan PBB terealisasi sebesar Rp. 13,3 miliar. Kendala utama yang menyebabkan tidak tercapainya target perolehan pajak PBB diakibatkan oleh kesadaran dan niat wajib pajak yang masih rendah untuk membayar pajak PBB. Terbukti banyak masyarakat yang masih terlambat membayar pajak PBB. Dalam situasi ini, wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman yang

kuat tentang pajak sehingga mereka mampu terus mengikuti perkembangan setiap peraturan atau ketentuan yang ada<sup>6</sup>.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak turut dipengaruhi oleh tingkat moralitas (religiusitas)<sup>7</sup>. Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan menjelaskan bahwa pajak dimaknai sebagai bentuk partisipasi wajib sebagai warga negara<sup>8</sup>. Melalui sifat wajib tersebut maka orang yang memiliki religiusitas yang baik pasti akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, ketika Ia melanggar nilai dan norma tertentu pasti akan timbul rasa bersalah dan ketegangan didalam batin. Nilai-nilai tersebut yang memaksa individu untuk tidak melakukan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang ada<sup>9</sup>.

Jika dilihat, jumlah wajib pajak yang besar dapat menjadi energi positif dalam peningkatan penerimaan pajak, akan tetapi wajib pajak dengan jumlah yang besar tidak selalu berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak. Penerimaan pajak dapat maksimal jika tingkat kepedulian wajib pajak tinggi akan pentingnya dana pajak untuk memajukan suatu negara. Berbagai usaha yang ditempuh Pemerintah untuk menaikkan ketertiban masyarakat salah satunya dengan memberlakukan program pemutihan pajak. Melalui upaya ini pemerintah memberikan keringanan penghapusan denda bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak. Sebelumnya, denda yang diberikan sebesar 2% setiap bulannya, sehingga harapan dari pemerintah supaya masyarakat dapat memanfaatkan momen ini untuk membayar pajak tanpa dikenakan denda administrasi. Diharapkan dari upaya ini selain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan juga dapat menambah tingkat kepatuhan masyarakat untuk menunaikan pajak. Adapun jangka waktu yang perlu diperhatikan karena jika sudah melewati masa yang ditentukan, maka pemerintah memberlakukan kembali denda administrasi secara normal.

Pada penelitian sebelumnya telah menemukan beberapa aspek yang berpengaruh pada keberhasilan penerimaan pajak. Didik Darmawan (2010) telah melakukan riset dan membuktikan bahwa persepsi wajib pajak tentang penerapan sanksi denda PBB berpengaruh

---

<sup>6</sup> Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*, ed. by Suryadi Saat, 2014th edn (Ciracas, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014) <<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19812>>.

<sup>7</sup> Yoga Haqim Wiguna, 'Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi' (Universitas Islam Indonesia, 2018).

<sup>8</sup> Yoga Haqim Wiguna, Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi, p. 34.

<sup>9</sup> Tedi Kholiludin, *Menjaga Tradisi Di Garis Tepi: Identitas, Pertahanan Dan Perlawanan Kultural Masyarakat Etno-Religius*, ed. by Khoirul Anwar (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), 2018).

positif pada keberhasilan penerimaan PBB. Sebaliknya pemasukan wajib pajak justru berpengaruh negatif terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Indah Wulandari Wilujeng, Imahda Khoiri Furqon (2021) yang membuktikan bahwa persepsi wajib pajak mengenai penerapan sanksi denda PBB dan penghasilan wajib pajak berpengaruh negatif pada keberhasilan penerimaan PBB. Kemudian penelitian lain dilangsungkan oleh Ibnu Muttaqin, Eva Anggra (2018) yang mendapatkan hasil persepsi wajib pajak berpengaruh negatif pada keberhasilan penerimaan PBB. Setelah itu penelitian yang dicoba dilakukan oleh Rizka Wahyuni Siregar (2015) membuktikan bahwa perilaku wajib pajak tentang kegunaan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap penerapan sanksi denda mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB<sup>10</sup>. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sobrotul Intikhanah, Nin Sulistyowati (2010) membuktikan bahwa persepsi wajib pajak mengenai penerapan denda PBB mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB, sedangkan pendapatan wajib pajak tidak berdampak terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kurangnya konsistensi dalam hubungan antara religiusitas, persepsi pelaksanaan sanksi denda, tingkat penghasilan, dan pemutihan pajak terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Perihal ini artinya perlu adanya penelitian sejenis untuk memperluas riset terdahulu. Penelitian ini akan mengkombinasikan variabel-variabel independen dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel independen baru yaitu religiusitas dan pemutihan pajak. Selain itu, penelitian objektif yang akan dilakukan di Gunungpati inilah yang menjadi pembeda penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Keberhasilan Penerimaan PBB merupakan variabel dependen dari penelitian ini, sedangkan variabel independennya adalah religiusitas, persepsi pelaksanaan sanksi denda, tingkat penghasilan, dan pemutihan pajak. Dalam hal ini diharapkan hasil penelitian akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi relevansi teori atribusi dengan keempat variabel.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gunungpati karena tingkat realisasinya termasuk rendah dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Namun dilihat dari data realisasinya, pada tahun 2022 tingkat realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Gunungpati mengalami peningkatan. Maka dengan dasar tersebut penulis ingin mengkaji variabel apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak, khususnya pada sektor Pajak Bumi dan

---

<sup>10</sup> Rizka Wahyuni Siregar, 'Pengaruh Sikap Wajib Pajak Mengenai Fungsi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Sppt Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pbb Kota Pekanbaru', *JOMFekom*, 4.1 (2015), 843–57 <<https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>>.

Bangunan. Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis akan mengambil judul skripsi **“Pengaruh Religiusitas, Persepsi Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda, Tingkat Penghasilan, Dan Pemutihan Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan”** dengan penjabaran rumusan masalahnya sebagai berikut:

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah religiusitas wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB?
2. Apakah persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB?
3. Apakah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB?
4. Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berlandaskan penjelasan latar belakang beserta rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis peran religiusitas dalam implementasi PBB sangat penting.
2. Untuk memahami dan menganalisis bukti subyektif tentang penerapan sanksi denda dalam kaitannya dengan keberhasilan penerimaan PBB.
3. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh tingkat penghasilan dalam hubungannya dengan keberhasilan penerimaan PBB.
4. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh pemutihan pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

### **Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari penjabaran latar belakang dan rumusan masalah diatas, diharapkan temuan penelitian ini dapat berguna untuk:

- a. Bukti heuristik dari pengaruh religiusitas, persepsi wajib pajak, tingkat penghasilan, dan pemutihan pajak terhadap penerimaan PBB di Kecamatan Gunungpati.
- b. Sumber pengetahuan dan pandangan mendalam yang berguna sebagai informasi tambahan dalam ilmu perpajakan dan pada penelitian selanjutnya.

- c. Menambah kajian literatur dalam bidang perpajakan, khususnya tentang PBB dan berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
2. Manfaat Praktis
    - a. Bagi Pembaca

Dengan munculnya riset ini semoga dapat berguna untuk menambah pemahaman bagi pembaca tentang pengaruh religiusitas, persepsi wajib pajak, tingkat penghasilan, dan pemutihan pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
    - b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya riset ini penulis berkeinginan agar temuan ini dapat meluaskan pengetahuan dan pandangan tentang teori pajak PBB, sehingga nantinya dapat memunculkan pengembangan dan penerapan teori baru dalam penelitian selanjutnya.
    - c. Bagi Lembaga Terkait

Dari adanya riset ini semoga dapat menambah bukti tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan PBB, sehingga penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi lembaga terkait untuk lebih meningkatkan sistem perpajakan baik dari segi pelayanan, segi kemudahan, dsb yang dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Merupakan penggambaran kerangka penulisan yang akan lebih dijabarkan pada pembahasan selanjutnya. Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan latar belakang mengenai pengambilan suatu topik dalam penelitian. Pembahasan ini berguna sebagai gambaran umum dari permasalahan penelitian. Selain latar belakang, pada bab ini juga memuat perumusan masalah, tujuan dari penelitian, serta maslahat dari penelitian ini.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini merangkum teori dasar yang dipakai sebagai penguat argumen dalam penelitian sekaligus memberikan deskripsi dari setiap variabel independen dan variabel dependen. Adapun bagian lainnya, bab ini juga memuat referensi artikel jurnal terdahulu, hipotesis penelitian, serta kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bagian ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan teknik pengumpulan informasi atau pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian selanjutnya, seperti metode penelitian, ukuran sampel dan perhitungan ukuran sampel, definisi operasional variabel, jenis dan teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menyampaikan hasil analisis data setelah dilakukannya penelitian. Setelah analisis data menggunakan berbagai model regresi, kemudian dilakukan interpretasi hasil apakah hipotesis yang diajukan dinyatakan sebagai pernyataan yang dapat diterima atau tidak.

### **BAB V : PENUTUP**

Bagian ini menjadi bagian final dari penelitian skripsi. Pada bab ini diuraikan inti dari penelitian serta saran-saran bagi pembaca.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi atau *Attribution Theory* pertama kali dimunculkan oleh ilmuwan yang bernama Fritz Heider ditahun 1958. Teori atribusi merupakan teori yang membahas mengenai kapasitas kesadaran diri individu. Teori yang dimaksud berfokus pada bagaimana seseorang dapat menjelaskan mengapa orang lain atau dirinya sendiri melakukan perilaku tersebut, dan apakah alasan tersebut berasal dari dorongan dari dalam seperti sifat, karakter, sikap atau dorongan yang muncul dari luar seperti keadaan atau peristiwa tertentu yang berakibat pada tingkah laku seseorang<sup>11</sup>. Fritz Heider menyatakan bahwa dua jenis energi yaitu energi internal yang mencakup hal-hal seperti kemampuan, usaha, dan kelelahan, dan energi eksternal yang mencakup hal-hal seperti aturan dan cuaca bekerja sama untuk memberikan pengaruh pada perilaku pada manusia<sup>12</sup>. Atribut internal atau eksternal dapat mempengaruhi kebiasaan kerja dan kinerja individu. Orang akan lebih tergerak untuk melakukan sesuatu jika mereka merasakan lebih banyak atribut internal daripada eksternalnya.

Melalui penelitiannya, Kelley dan Michela menekankan bahwa teori atribusi berhubungan dengan proses kognitif dimana individu menginterpretasikan perilaku berhubungan dengan bagian tertentu dari lingkungan yang relevan<sup>13</sup>. Selain itu menurut Pasaribu dan Wijaya, teori atribusi merupakan model teori yang menerangkan tentang sikap dirinya sendiri maupun orang lain terjadi karena adanya faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi<sup>14</sup>. Menurut Hooper dalam Ramadhanty dan Zulaikha, teori atribusi menjelaskan proses atribusi untuk memahami mengapa suatu peristiwa atau perilaku terjadi atau dengan kata lain, apakah terjadinya perilaku atau peristiwa tersebut berasumsi situasional

---

<sup>11</sup> Reza Ferdiansyah, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Pemerintah (Studi Empiris Pada Bpkp Perwakilan Provinsi Dki Jakarta)', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16.2 (2016), 109 <<https://doi.org/10.20961/jab.v16i2.200>>.

<sup>12</sup> Ferdiansyah, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Pemerintah (Studi Empiris Pada Bpkp Perwakilan Provinsi DKI Jakarta), p. 111.

<sup>13</sup> Harold H. Kelley and John L. Michela, 'Attribution Theory and Research', *Annual Review of Psychology*, 31.1 (1980), 457-501 <<https://doi.org/10.1146/annurev.ps.31.020180.002325>>.

<sup>14</sup> Ehad Mangaratua Pasaribu and Satria Yudhia Wijaya, 'Implementasi Teori Atribusi Untuk Menilai Perilaku Kecurangan Akuntansi', *Ekonomi Dan Bisnis*, 4.1 (2017), 41-66 <<https://doi.org/10.35590/jeb.v4i1.735>>.

(terkait dengan keadaan eksternal) atau disposisional (terkait dengan karakteristik internal)<sup>15</sup>. Berdasarkan penjelasan tersebut, teori atribusi juga dapat digunakan sebagai teori pendukung dalam konteks perpajakan, seperti dalam menentukan faktor-faktor tertentu yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Contoh lain adalah dalam studi tentang penggelapan pajak, dimana perilaku penggelapan pajak disebabkan oleh aspek internal yang dihasilkan dari persepsi individu atau aspek eksternal yang disebabkan dari dorongan lingkungan sekitar individu.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Romadhon mengaitkan teori atribusi dengan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak<sup>16</sup>. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa para wajib pajak mematuhi aturan perpajakan bukan karena mereka sendiri yang menghendaki untuk patuh, melainkan dari adanya program atau kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah, sehingga hal tersebut dapat memotivasi wajib pajak untuk semakin patuh. Kebijakan tersebut bukan dalam bentuk ancaman atau pemaksaan, tetapi berupa sosialisasi atau edukasi pajak. Namun berbeda apabila disebabkan oleh faktor eksternal. Para wajib pajak cenderung mematuhi aturan bukan karena kesadaran yang ada pada diri mereka, akan tetapi semata-mata agar terhindar dari pemberian sanksi denda ataupun peringatan. Faktor lain yang menyebabkan wajib pajak enggan untuk patuh adalah karena kualitas sistem, tata kelola, maupun institusi yang tidak sesuai dengan harapan wajib pajak.

Teori atribusi dalam penelitian ini sangat sesuai dijadikan sebagai teori pendukung karena penulis akan mendalami perilaku guna melakukan penelitian empiris, sehingga dapat diketahui faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Keberhasilan penerimaan PBB dapat terjadi apabila wajib pajak mempunyai niat dan patuh untuk membayar pajak. Menurut teori ini, religiusitas dan persepsi pelaksanaan sanksi denda menjadi aspek utama dalam keberhasilan penerimaan pajak karena merupakan faktor internal yang digunakan wajib pajak untuk mempengaruhi keputusannya dalam membayar pajak. Selain itu, variabel lain tingkat penghasilan dan pemutihan pajak menjadi faktor eksternal dari penelitian ini yang merupakan pengaruh luar sehingga dapat membangkitkan tindakan dari wajib pajak. Dari keempat variabel tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur penentu keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

---

<sup>15</sup> Ramadhanty and Zulaikha, Kualitas Pelayanan Fiskus and others, '29037-61852-1-Sm', 9 (2020), 1–15.

<sup>16</sup> Fitri Romadhon and Erlina Diamastuti, 'Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory', *Jurnal Ilmiah Esai*, 14.1 (2020), 17–35 <<https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI>>.

## **2.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

### **2.2.1 Pengertian**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan dengan dasar Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan karena besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, sedangkan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

### **2.2.2 Dasar Hukum**

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk jenis pajak objektif. Menurut Undang-undang PBB, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan atau bangunan. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain:

- a. Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
- c. Keputusan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah pusat dan daerah
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998 tentang klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 16/PJ.6/1998 tentang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

### **2.2.3 Objek dan Pengecualian PBB**

#### **a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1994, yang menjadi objek pajak PBB adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, tambang, dan lain-lain, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat

perbelanjaan, jalan tol, pagar mewah, tempat olahraga, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lain-lain.

### **b. Pengecualian Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Objek yang dikecualikan dari Pajak Bumi dan Bangunan antara lain<sup>17</sup>:

1. Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan untuk kebudayaan nasional, yang dimaksudkan tidak untuk memperoleh keuntungan.
2. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.
3. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani sesuatu hak.
4. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Artinya bila tanah atau gedung perwakilan Republik Indonesia di Negara tertentu tidak dikenai PBB. Hal yang sama kita perlakukan terhadap tanah atau gedung Negara tersebut yang ada di Negara kita.
5. Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan. Contoh: WHO, UNICEF, IMF.

#### **2.2.4 Subjek Pajak PBB**

Subjek pajak PBB ialah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak PBB. Jika subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak objek pajak sedangkan perawatannya dikuasakan kepada orang atau badan, maka kuasanya dapat dilimpahkan kepada orang atau badan yang diberi kuasa. Maka Ia dapat ditunjuk sebagai wajib pajak oleh Dirjen Pajak. Namun penunjukan tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Laily Fauziyah, 'PENGARUH KARAKTERISTIK PADA WAJIB PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PBB (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan Satu)' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

<sup>18</sup> Didik Darmawan, 'Analisis Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang', *Library.Uns.Ac.Id*, 2010.

## **2.2.5 Unsur Dalam Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan**

### **a. Dasar Pengenaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)**

Pasal 6 Ayat (1) UU PBB menentukan bahwa yang dijadikan dasar untuk pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru.

Nilai Jual Kena Pajak (*assessment value*) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Pengenaan adalah kegiatan penghitungan, penetapan, pembebanan pajak terutang dengan unsur pokok yaitu tarif dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Tarif dalam pengenaan PBB merupakan jenis tarif tunggal dan ditetapkan sebesar 0,5%, sedangkan NJKP atau *assessed ratio* merupakan dasar penghitungan pajak. Besarnya NJKP untuk ketentuan PBB tahun 2001 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang penetapan besarnya NJKP untuk penghitungan PBB adalah sebagai berikut:

1. Objek pajak perkebunan sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP
2. Objek pajak perhutanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP
3. Objek pajak pertambangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP
4. Objek pajak lainnya:
  - a. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP apabila NJOP sama dengan atau lebih besar Rp 1 miliar (satu miliar rupiah)
  - b. Sebesar 20% dari NJOP apabila NJOP lebih kecil Rp 1 miliar (satu miliar rupiah)

### **b. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)**

Dalam pengenaan PBB, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar pengenaan PBB dan terhadap setiap wajib pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar perhitungan PBB, mulai tahun 2001 NJOPTKP ditetapkan Rp. 10 juta (sepuluh juta) dan maksimal Rp. 12 juta (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat.

### **c. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, Tempat dan Saat Pajak Terutang PBB**

#### **1). Tarif Pajak**

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak PBB adalah sebesar 0,5 (lima puluh persen) sesuai UU No. 12 Tahun 1994 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PBB terutang} = (\text{Tarif} \times \text{NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTPK}))$$

Hasil penghitungan, penetapan, dan pembebanan pajak terutang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang berisikan antara lain; nama serta alamat wajib pajak, besarnya pajak terutang, dan data mengenai objek pajak. Daluarsa pengenaan PBB adalah setelah 10 (sepuluh) tahun pajak. Jumlah pajak terutang yang ditetapkan dalam SPPT secara keseluruhan akan menghasilkan pokok ketetapan PBB.

#### **2). Dasar Pengenaan PBB**

Dasar yang digunakan sebagai pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan. Pengertian NJOP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 33 UU No. 12 Tahun 1994 adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. Untuk dasar perhitungan pajak PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besarnya persentase NJKP yang telah ditetapkan dengan PP No. 48 tahun 1997 yaitu:

(a). Sebesar 40% yang diperuntukan bagi :

1. Objek pajak perumahan yang wajib pajak perseorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp. 1 Miliar.
2. Objek pajak perkebunan yang luas lahannya sama atau lebih luas dari 25 ha yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh BUMN, badan swasta, maupun berdasarkan kerjasama operasional antara pemerintah dan pihak swasta.

3. Objek pajak kehutanan, tetapi tidak termasuk areal blok tabungan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemegang hak perusahaan lahan.

(b). Sebesar 20% untuk objek pajak lainnya.

### 3). Tempat dan Saat PBB Terutang

Pengertian tahun pajak dalam PBB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim (1 Januari s/d 31 Desember) sedangkan yang menentukan saat pajak terutang PBB adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Pengaturan penetapan tempat PBB terutang yang meliputi letak objek pajak sebagai berikut:

1. Untuk daerah Jakarta, diwilayah DKI Jakarta
2. Untuk daerah lainnya, di wilayah kabupaten daerah tingkat II atau kotamadya Daerah tingkat II

#### d. Menghitung PBB

Diketahui wajib pajak A memiliki objek pajak di kota Bogor dan memiliki objek pajak antara lain:

- Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp. 300.000/m<sup>2</sup>
- Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp. 350.000/m<sup>2</sup>
- Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp. 50.000/m<sup>2</sup>
- Pagar sepanjang 120 m<sup>2</sup> dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000/m<sup>2</sup>

Jika tarif PBB berlaku di kota Bogor sebesar 0,5% untuk NJOP nilainya Rp. 1 miliar. Hitung besarnya PBB yang harus dibayar wajib pajak tersebut setiap tahun.

#### Cara hitung:

$$\text{NJOP Bumi} = 800 \times \text{Rp. } 300.000 = \text{Rp. } 240.000.000$$

NJOP Bangunan

$$\text{Rumah} = 400 \times \text{Rp. } 350.000 = \text{Rp. } 140.000.000$$

$$\text{Taman} = 200 \times \text{Rp. } 50.000 = \text{Rp. } 10.000.000$$

$$\text{Pagar} = 120 \times 1,5 \times \text{Rp. } 175.000 = \text{Rp. } 31.500.000$$

$$\text{Total NJOP Bangunan} = \text{Rp. } 140.000.000 + \text{Rp. } 10.000.000 + \text{Rp. } 31.500.000$$

NJOP Bangunan = Rp. 181.500.000

Total NJOP = Rp. 240.000 + Rp. 181.500.000 = Rp. 421.500.000

PBB terutang = Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP)

PBB terutang = 0,5% x 20% x (421.500-10.000.000)

PBB terutang = Rp. 411.500

### 2.3 Keberhasilan Penerimaan PBB

Istilah pajak dalam hukum syariah adalah *dharibah* yang berarti wajib melakukan sesuatu, seperti diharuskan melakukan sesuatu<sup>19</sup>. Meskipun *dharibah* memiliki banyak arti dalam ajarannya, namun otoritas agama memandang *dharibah* sebagai sarana pengungkapan harta yang telah dimaknai sebagai hukum. Ada dua pandangan mengenai hukum pajak dalam Islam. Pendapat pertama memperbolehkan adanya pemungutan pajak, sedangkan pendapat kedua memaknai pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kedzaliman sehingga hukum pajak adalah haram<sup>20</sup>. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S Surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Diterjemahkan dari tafsir Al-Maraghi oleh Ahmad Mushthafa Al-Maraghi dalam bukunya menegaskan bahwa surah Al-Baqarah ayat 188 adalah dalil yang merupakan larangan mengambil harta dengan sistem yang bathil. Menurut sumber, hal itu secara konsisten telah dilarang karena bisa mengakibatkan kemudharatan bagi orang lain<sup>21</sup>. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa negara tidak boleh memungut pajak secara berlebihan yang akan mengakibatkan kesengsaraan pada rakyat. Menurut ayat ini juga ditegaskan bahwa Islam melarang memungut harta sedikitpun dari cara yang tidak dianjurkan oleh syariah.

---

<sup>19</sup> Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, 'Pajak Dalam Islam', *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3 (2015), 106.

<sup>20</sup> Astuti, Arso, and Wigati, *Pajak Dalam Islam*, p. 2.

<sup>21</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz 1*, ed. by Anwar Rasyidi and others, 2nd edn (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992).

Sikap aktif wajib pajak yang meningkat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dapat menentukan tercapai atau tidaknya target penerimaan pajak. Sikap tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak<sup>22</sup>. Menurut Azwar, komponen tindakan dari perwujudan sikap berfungsi sebagai tanda keluwesan dalam menghadapi sesuatu sesuai dengan tindakan yang ada. Dengan demikian, keberhasilan penerimaan PBB diartikan sebagai sikap positif wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan. Keadaan ini digambarkan sebagai ketaatan wajib pajak, sehingga ketika tingkat ketaatan wajib pajak semakin tinggi, maka tingkat perolehan pajak juga semakin tinggi. Menurut Laily Fauziah (2008) faktor keberhasilan penerimaan PBB sebagai berikut :

1. Kepatuhan pembayaran PBB, meliputi ketepatan wajib pajak dalam membayar PBB, penerimaan pajak terhambat.
2. Kegiatan administrasi PBB, meliputi pelayanan fasilitas, perbaikan fasilitas umum.

#### 2.4 Religiusitas

Religiusitas merupakan komponen fundamental dari keyakinan yang dimiliki wajib pajak yang berfungsi sebagai bukti bahwa wajib pajak mengakui Tuhan sehingga memiliki rasa takut ketika melakukan pelanggaran pajak. Religiusitas dipercaya dapat mengontrol tindakan seseorang dari perilaku yang menyimpang<sup>23</sup>. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 208 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*

Dalam tafsir Al-Maraghi yang diterjemahkan oleh Drs. H. Al Humam MZ. Allah menegaskan perintah bahwa orang yang beriman tidak boleh sekali-kali berperilaku menyimpang dari syariat Islam<sup>24</sup>. Dijelaskan juga bahwa kita tidak boleh mengikuti jalan yang sesat karena akan menimbulkan perpecahan dalam agama atau pertentangan dan persengketaan. Kaitannya variabel religiusitas dengan ayat tersebut yaitu bahwa wajib pajak yang taat kepada agama dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya maka nilai-nilai ke

---

<sup>22</sup> Mena Meri Selly Sitepu, 'Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada UPT VI Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan' (Universitas Medan Area, 2017).

<sup>23</sup> Nurdhiana Tjandra Tirtono, Triani, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal STIE Semarang*, 14.3 (2022), 130–51.

<sup>24</sup> Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz 1, p. 199.

Islam akan tertanam dalam ruang lingkup ibadah maupun bermuamalah. Sehingga dengan sikap religius yang dimiliki, wajib pajak tidak akan melakukan penyimpangan pajak karena senantiasa selalu mengingat perintah Allah SWT.

Terlepas dari persepsi pajak yang merupakan kewajiban sosial sebagai warga negara, pajak juga diartikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Meskipun tidak memperoleh imbalan secara langsung, tetapi pajak digunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional seperti halnya peningkatan fasilitas umum, pembangunan jalan, dan lainnya yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Ketika ada bukti bahwa pajak akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang sah, maka umat Islam wajib membayar pajak sesuai yang telah ditentukan bagi mereka<sup>25</sup>. Adapun dimensi dari religiusitas menurut Glock dan Stark (2005) yaitu sebagai berikut :

1. Keyakinan (tingkat keyakinan wajib pajak terhadap kebenaran ajaran agama)
2. Praktik Agama (ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ritual agamanya)
3. Penghayatan (sejauh mana wajib pajak dapat merasakan pengalaman religius)
4. Pengetahuan Agama (pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dalam ilmu agama)
5. Konsekuensi (mengetahui konsekuensi apabila melanggar hukum Islam)

## **2.5 Persepsi Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda**

Menurut Rizka Wahyuni Siregar, persepsi adalah proses yang dibantu oleh reaksi penginderaan, yaitu ketika seseorang dirangsang oleh objek indera<sup>26</sup>. Proses persepsi ini adalah dampak dari tindakan dan reaksi, emosi yang kuat dan keinginan atas pemikiran tentang sikap yang menghasilkan respon dari persepsi.

Mardiasmo mengemukakan bahwa sanksi pajak menandakan sinyal yang baik bahwa aturan perpajakan akan dipenuhi. Sanksi pajak dapat dikatakan sebagai tindakan preventif untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan<sup>27</sup>. Dalam hal tersebut diyakini bahwa dengan penetapan sanksi pajak membuat wajib pajak mematuhi peraturan yang mengatur perpajakan. Sanksi dalam Undang-Undang Perpajakan dapat mencakup sanksi pidana maupun sanksi denda (termasuk denda dan bunga). Jadi kesimpulannya adalah

---

<sup>25</sup> Tjandra Tirtono, Triani, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, p. 134.

<sup>26</sup> Siregar, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Mengenai Fungsi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda Pelayanan Fiskus, Dan, Sppt Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB Kota Pekanbaru*, p. 4.

<sup>27</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, ed. by Maya, 2018th edn (Yogyakarta: Andi, 2018).

masyarakat akan bersedia membayar PBB apabila pelaksanaan sanksi pajak dilakukan secara tegas dan konsisten. Ketika individu memiliki persepsi yang baik tentang pajak mereka tidak akan mau melakukan pelanggaran dan lebih memilih untuk menyetor pajak ketimbang mereka mendapat hukuman denda dari petugas pajak. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu untuk memiliki persepsi yang baik tentang pelaksanaan sanksi denda, sehingga nantinya akan meningkatkan kepatuhan pajak individu tersebut<sup>28</sup>. Pada akhirnya jika ketaatan wajib pajak tercipta maka akan meningkatkan perolehan pajak yang diterima. Menurut Laily Fauziah (2008) dimensi persepsi wajib pajak terhadap penerapan sanksi denda PBB sebagai berikut :

1. Denda PBB : tingkat denda PBB, pembayaran pajak secara tepat waktu.
2. Pelaksanaan PBB : pembayaran denda PBB, pajak tidak memberatkan.

## **2.6 Tingkat Penghasilan**

Keadaan keuangan seorang wajib pajak menjadi faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat ketaatan membayar pajak. Keadaan keuangan yang dimaksud adalah seberapa besar kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kebutuhannya dari penghasilan yang diterima selama satu bulan sebagai timbal balik setelah adanya aktivitas bekerja. Bekerja menurut Islam dapat dikatakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Menurut Choirul Huda, aktualisasi bekerja manusia merupakan cara untuk bertahan hidup, dan mencari kebahagiaan karena manusia membutuhkan sebuah pengakuan. Bekerja merupakan wujud pengabdian manusia kepada Allah yang telah memberikan kebebasan untuk berkarya<sup>29</sup>.

Individu yang berpenghasilan tinggi cenderung akan taat untuk melaporkan pajaknya dengan jujur daripada individu yang memperoleh penghasilan yang rendah. Dengan kata lain, jika perolehan gaji wajib pajak itu tinggi, maka dapat mempengaruhi tingkat pemasukan pajak. Situasi ini terjadi karena wajib pajak tidak menemui kesulitan keuangan sehingga cenderung patuh untuk membayar pajak. Akan tetapi jika kemampuan bekerja wajib pajak menurun maka akan menurunkan tingkat penghasilan yang akan berdampak pada kegiatan lainnya seperti konsumsi barang dan jasa<sup>30</sup> dan bahkan menimbulkan utang pajak. Walaupun demikian, kesanggupan bekerja akan dipertahankan oleh wajib pajak itu sendiri. Jadi adanya penguasaan

---

<sup>28</sup> Bobby Wirawan Aji, 'Pengaruh Faktor Perilaku Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

<sup>29</sup> Choirul Huda, 'ETOS KERJA PENGUSAHA MUSLIM (Studi Kasus Pada Pengusaha Muslim Alumni UIN Walisongo Semarang)', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.2 (2016), 79–107 <<https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.2.1156>>.

<sup>30</sup> MBP Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 1st edn (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010).

pajak tidak akan menurunkan kemampuan untuk bekerja, tetapi berpengaruh terhadap kemampuan individu untuk menabung dan berinvestasi<sup>31</sup>. Adapun dimensi dari tingkat penghasilan menurut Fitroh (2019) adalah:

1. Pendapatan wajib pajak yang diterima perbulan
2. Pekerjaan wajib pajak
3. Beban keluarga yang ditanggung oleh wajib pajak

## 2.7 Pemutihan Pajak

Salah satu upaya terpenting Pemerintah untuk menaikkan pendapatan daerah ialah dengan memberlakukan pemutihan pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemutihan dimaknai sebagai proses, cara, perbuatan memutihkan<sup>32</sup>. Pemutihan pajak dapat diartikan sebagai keringanan yang diperoleh wajib pajak untuk tidak dikenai denda dari hutang pajak yang terlambat dibayarkan. Dalam perspektif Islam, pemutihan pajak memberikan keringanan bagi masyarakat sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk membayarkan pajak PBB. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Ditafsirkan dari tafsir Imam Al-Qurthubi disimpulkan bahwa jika seseorang dalam keadaan berhutang dan belum mampu melunasi, maka tunggu dan berikan waktu sampai orang tersebut dapat membayar hutang yang bersangkutan. Tetapi akan lebih utama apabila hutang tersebut dilebur, dalam arti membebaskan hutang tersebut dari orang yang berhutang. Tindakan tersebut akan memperoleh keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Penggalan ayat tersebut mengandung makna keutamaan pemberian toleransi waktu kepada orang yang belum mampu untuk membayar hutangnya sampai orang tersebut tidak lagi mengalami keadaan yang sulit<sup>33</sup>. Dari ayat inilah dapat dijadikan sebagai dasar untuk meringankan wajib pajak terutama dalam menunaikan pajak.

---

<sup>31</sup> Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, p. 74.

<sup>32</sup> Ni Made Darmakanti and Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, 'Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi', *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2.2 (2021), 88–94 <<https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>>.

<sup>33</sup> Ag. Maulana and Nur Sakinah, 'Konsep Toleransi Terhadap Orang Yang Berhutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah 280', *Kutubkhanah*, 20.2 (2021), 162 <<https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v20i2.13350>>.

Kebijakan pemutihan pajak yang diterapkan Pemerintah, bermaksud memberikan keringanan kepada masyarakat dari denda pajak yang diberikan akibat terlambat dibayarkan<sup>34</sup>. Untuk denda normal diberikan sebesar 2% setiap bulannya. Terhitung dari tahun 2017 sampai 2021, Pemerintah kota Semarang menghapus denda Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi kebijakan ini menjadi prioritas dari masing-masing daerah yang mempunyai aturan yang berbeda-beda untuk program pemutihan pajak. Adapun indikator pemutihan pajak menurut Wardani (2018) sebagai berikut :

1. Sunset Policy : program penghapusan sanksi atau denda pajak
2. Kesadaran wajib pajak : hak serta kewajiban, kepercayaan masyarakat, dorongan dalam diri sendiri.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependen	Alat analisis	Hasil
1.	Didik Darmawan (2010)	Analisis Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang	X1 = kesadaran perpajakan X2 = pemahaman WP terhadap UU dan peraturan perpajakan X3 = persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB X4 = pendapatan WP	Y = keberhasilan penerimaan PBB	Analisis regresi linier berganda	- X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. - X2 berpengaruh terhadap variabel Y. - X3 berpengaruh terhadap variabel Y. - X4 tidak berpengaruh terhadap variabel Y.
2.	Indah Wulandari Wilujeng, Imahda Khoiri Furqon	Analisis Faktor-Faktor Wajib Pajak Terhadap Realisasi	X1 = kesadaran perpajakan WP X2 = pemahaman WP atas UU	Y = keberhasilan realisasi penerimaan PBB	Statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi	- X1 secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. - X2 secara parsial

<sup>34</sup> Darmakanti and Ema Sri Febriyanti, *Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi*, p. 92.

	(2021)	Penerimaan PBB Di Kabupaten Pekalongan	dan peraturan perpajakan PBB X3 = persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB X4 = pendapatan WP X5 = pelayanan fiskus			tidak berpengaruh terhadap variabel Y. - X3 secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Y. - X4 secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Y. - X5 secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y.
3.	Ibnu Muttaqin, Eva Anggra (2018)	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, SPPT, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	X1 = kesadaran membayar pajak X2 = persepsi WP dalam pelaksanaan sanksi denda X3 = SPPT X4 = Pemeriksaan pajak	Y = keberhasilan penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan	Analisis regresi linier berganda, dihitung dengan rumus slovin	- X1, X2, X3, X4 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. - X1 berpengaruh terhadap variabel Y. - X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. - X3 berpengaruh terhadap variabel Y. X4 tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

4.	Rizka Wahyuni Siregar (2015)	Pengaruh Sikap Wajib Pajak Mengenai Fungsi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan SPPT Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB Kota Pekanbaru	X1 = sikap WP mengenai fungsi pajak X2 = persepsi WP dalam pelaksanaan sanksi denda X3 = pelayanan fiskus X4 = SPPT	Y = keberhasilan penerimaan PBB di kota Pekanbaru	Analisis regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- X1 berpengaruh terhadap variabel Y.</li> <li>- X2 berpengaruh terhadap variabel Y.</li> <li>- X3 berpengaruh terhadap variabel Y.</li> <li>- X4 berpengaruh terhadap variabel Y.</li> </ul>
5.	Sobrotul Imtikhanah, Nin Sulistyowati (2010)	Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PBB Di Kabupaten Pekalongan	X1 = kesadaran perpajakan WP X2 = pemahaman WP atas UU dan peraturan perpajakan PBB X3 = persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB X4 = pendapatan WP X5 = pelayanan fiskus	Y = keberhasilan penerimaan PBB	Analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- X1 secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y.</li> <li>- X2 secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Y.</li> <li>- X3 secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Y.</li> <li>- X4 secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Y.</li> <li>- X5 berpengaruh terhadap variabel Y.</li> </ul>

6.	Boby Wirawan Aji (2014)	Pengaruh Faktor Perilaku Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	X1 = kesadaran perpajakan X2 = pemahaman WP terhadap UU dan Peraturan Perpajakan X3 = persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda X4 = pendapatan WP	Y = keberhasilan penerimaan PBB	Analisis regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.</li> <li>- X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.</li> <li>- X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.</li> <li>- X4 berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y.</li> </ul>
----	-------------------------	--	--	---------------------------------	----------------------------------	--

7.	Angga Munggara Harisman (2009)	Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Tax Payer (Wajib Pajak) Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan	X1 = tingkat kesadaran WP X2 = pemahaman WP terhadap UU dan peraturan perpajakan PBB X3 = persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB X4 = sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah X5 = pendidikan WP X6 = lama tinggal WP dilokasi objek PBB X7 = status rumah WP X8 = pendapatan WP terhadap berat tidaknya beban PBB	Y = keberhasilan penerimaan PBB	Analisis regresi linier berganda dengan variabel dummy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari hasil Uji t, secara parsial variabel X1, X4, X5, X6, X7, X8 tidak berpengaruh terhadap variabel Y.</li> <li>- Secara parsial variabel X2 dan X3 berpengaruh terhadap variabel Y.</li> <li>- Dari hasil uji F, variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 X8 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.</li> </ul>
----	--------------------------------	--	--	---------------------------------	--	--

## 2.9 Rumusan Hipotesis

### 2.9.1 Pengaruh Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB

Melalui pernyataan dari Deky Anwar mengartikan religiusitas sebagai keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran kebaktian dan kewajiban yang berpijak

pada keyakinan itu<sup>35</sup>. Religiusitas menjadi aspek yang menunjukkan pembentukan watak dan kepribadian seseorang. Secara esensi religiusitas dapat memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan yang menurut mereka itu sebuah keharusan atau kewajiban dengan tidak menyimpang dari ajaran agama. Tinggi rendahnya penerimaan PBB dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan pajaknya. Wajib pajak dengan tingkat religiusitas tinggi akan memberikan pengaruh positif pada tingkat keberhasilan penerimaan PBB. Religiusitas akan mempengaruhi tindakan individu karena tingginya tingkat religiusitas akan meningkatkan level ketaatan wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Teori Atribusi menjelaskan bahwa religiusitas wajib pajak termasuk dari aspek internal yang tertanam dalam diri wajib pajak dan mempengaruhi tindakan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pajaknya. Menurut Mc Daniel & Burnett, individu dengan tingkat religiusitas tinggi memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari situasi yang tidak sesuai dengan moralitas<sup>36</sup>. Wajib pajak akan berusaha untuk mematuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Mereka akan memenuhi kewajiban pajaknya karena dalam ajaran agama memberikan tuntunan untuk selalu berbuat jujur. Jika tingkat religiusitas semakin tinggi, artinya penerimaan pajak juga akan terpengaruh sehingga keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tercapai. Kondisi ini disebabkan adanya seperangkat karakteristik wajib pajak yang dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak sehingga penerimaan pajak pun meningkat.

Temuan penelitian dari Indah Sukendriati (2022) memperoleh hasil bahwa religiusitas berdampak pada ketaatan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan<sup>37</sup>. Sejalan dengan penelitian Nanik Ermawati dan Zainal A. (2018) yang menunjukkan bahwa religiusitas berdampak pada kepatuhan wajib pajak membayar PBB<sup>38</sup>. Rosi Iswara (2019) melalui penelitiannya juga menunjukkan bahwa religiusitas

---

<sup>35</sup> DEKY ANWAR, ILHAM MARNOLA, and SURYANI SURYANI, 'Pengaruh Religiusitas Dan Komunitas Terhadap Motivasi Berwirausaha Para Pemuda', *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 4.2 (2019), 181 <<https://doi.org/10.15548/jebi.v4i2.244>>.

<sup>36</sup> S. W. McDaniel and J. J. Burnett, 'Consumer Religiosity and Retail Store Evaluative Criteria', *Journal of the Academy of Marketing Science*, 18.2 (1990).

<sup>37</sup> Indah Sukendriati, 'Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, SPPT, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pejagoan' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

<sup>38</sup> Sukendriati, 'Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, SPPT, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pejagoan', p. 69.

dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB<sup>39</sup>. Namun, belum ada penelitian secara ilmiah yang menyatakan tentang berpengaruh atau tidaknya religiusitas terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Sehingga untuk menilai apakah religiusitas berdampak pada keberhasilan penerimaan PBB, pada penelitian ini akan menambahkan variabel religiusitas sebagai variabel baru. Berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya, berikut merupakan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

### **H1 Religiusitas berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB**

#### **2.9.2 Pengaruh Persepsi Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB**

Secara umum persepsi dimaknai sebagai pemahaman, pengertian, atau interpretasi terhadap hal tertentu<sup>40</sup>. Plano juga sepakat dengan pengertian tersebut. Menurutnya persepsi adalah proses yang membentuk kesadaran akan suatu hal dari perantara pemikiran yang sehat<sup>41</sup>. Ketika wajib pajak sadar dengan berlakunya sanksi pajak, mereka tidak akan membayar lebih dari jatuh tempo. Dijatuhkan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dengan tempo 24 bulan jika tagihan pajak terlambat dan belum dibayar. Masyarakat yang paham tentang PBB akan menganggap pajak sebagai suatu bentuk keikutsertaan rakyat dalam upaya pembangunan nasional. Berdasarkan data realisasi penerimaan PBB tahun 2020-2022, bahwa penerimaan pajak di Kecamatan Gunungpati termasuk yang paling rendah di kota Semarang. Hal ini terjadi akibat ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran dari wajib pajak terhadap pembayaran PBB. Terbukti masih banyak masyarakat yang menunggak terhadap kewajiban pajak PBBnya. Oleh karena itu, wajib pajak cenderung akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak jika mereka memiliki afirmasi positif dan takut terhadap sanksi pajak terkait. Dalam situasi ini, maka penerimaan pajak dapat tercapai.

Teori atribusi digunakan untuk mempelajari bagaimana pengaruh aspek dari dalam maupun dari luar yang mendorong perilaku manusia. Persepsi wajib pajak dilihat dari gagasan atribusi merupakan unsur internal yang bersumber dari wajib pajak itu

---

<sup>39</sup> Rosi Iswara, 'Pengaruh Pendapatan Dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kedungkelor', *Eprints. Walisongo.Ac.Id* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

<sup>40</sup> Qohar Triyoga Praja, Anwar Made, and Sulistiyo, 'Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4.1 (2016), 1–12 <<http://ejournal.unikama.ac.id>>.

<sup>41</sup> Praja, Made, and Sulistiyo, Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, p. 4.

sendiri. Dalam hal ini pandangan wajib pajak akan mempengaruhi perilaku dari WP itu sendiri untuk membayar pajak PBB. Artinya, jika wajib pajak memiliki persepsi yang positif, hal itu berdampak pada tingkat ketaatan membayar pajak sehingga keberhasilan penerimaan PBB dapat tercapai.

Temuan penelitian sebelumnya oleh Tomy Yulian Arrizky (2018) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh positif pada keberhasilan penerimaan PBB<sup>42</sup>. Sesuai dengan penelitian Rizka Wahyuni Siregar (2015), yang menunjukkan bahwa keberhasilan penerimaan PBB juga dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap penerapan sanksi denda<sup>43</sup>. Kajian lain yang dilakukan Didik Darmawan (2010) menemukan bahwa keberhasilan penerimaan PBB dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap pengenaan sanksi denda<sup>44</sup>. Mengacu pada hasil temuan sebelumnya, hipotesis berikut yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

## **H2 Persepsi tentang pelaksanaan sanksi denda berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB**

### **2.9.3 Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB**

Mengutip dari artikel Ayu Wiji Anggraeni yang mengatakan bahwa masyarakat tidak akan kesulitan menunaikan pajak jika kewajiban pembayarannya masih dibawah dari penghasilan yang sebenarnya mereka dapatkan secara rutin<sup>45</sup>. Pada dasarnya petani di Gunungpati belum tentu berpenghasilan tinggi. Kenyataanya penghasilan keluarga bukan dipastikan berdasarkan luas tanah yang dimiliki. Masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah cenderung memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang rendah bila dibandingkan dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Biasanya tingkat penghasilan penduduk desa cenderung lebih rendah dibandingkan dengan penduduk kota. Mereka yang berpenghasilan rendah akan cenderung mendahulukan kebutuhannya sebelum membayar pajak. Jika dari wajib pajak tidak patuh membayar pajak maka hal

---

<sup>42</sup> Tomy Yulian Arrizky, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Tapin', *KINDAI*, 14.2 (2018), 170–83.

<sup>43</sup> Siregar, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Mengenai Fungsi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda Pelayanan Fiskus, Dan, Spt Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB Kota Pekanbaru*, p. 10.

<sup>44</sup> Darmawan, *Analisis Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang*, p. 65.

<sup>45</sup> Ayu Wiji Anggraeni, Mochammad Al Musadieq, and Achmad Husaini, 'Peranan Faktor Internal Dan Eksternal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dari Pertambangan Batu Kapur Di Kabupaten Tuban', *Jurnal Perpajakan*, 10.1 (2019), 1–10 <perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>.

ini berdampak pula terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian tingkat penghasilan wajib pajak akan mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan pajak yang bisa berdampak pada penerimaan perpajakan.

Berdasarkan teori Atribusi, tingkat penghasilan dikategorikan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi WP untuk melakukan pembayaran pajak. Dalam hal ini tinggi rendahnya penghasilan yang dimiliki WP dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak PBB. Apabila penghasilan tinggi maka dapat mendorong WP untuk melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, sehingga keberhasilan penerimaan pajak dapat tercapai.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Bobby Wirawan Aji (2014) membuktikan bahwa keberhasilan penerimaan PBB dipengaruhi oleh tingkat penghasilan wajib pajak<sup>46</sup>. Sesuai dengan studi tahun 2009 oleh Angga Munggara Harisman yang menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak berdampak positif pada keberhasilan penerimaan PBB<sup>47</sup>. Selain itu, temuan penelitian lainnya oleh Martika Cahyani dkk (2018) menunjukkan tingkat pendapatan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap PBB<sup>48</sup>. Berikut ini adalah hipotesis penelitian yang didukung oleh temuan penelitian sebelumnya:

### **H3 Tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB**

#### **2.9.4 Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB**

Kondisi saat pandemi Covid-19 ini bukan hanya menimbulkan dampak dibidang kesehatan saja, akan tetapi memiliki pengaruh yang cukup besar pula terhadap perekonomian masyarakat<sup>49</sup>. Tidak hanya itu, akibat adanya pandemi ini juga memberikan dampak pada Pendapatan Asli Daerah yang menurun, salah satunya dari penerimaan pajak PBB. Upaya pemerintah untuk meminimalisir penurunan penerimaan PBB yaitu dengan menerapkan strategi pemutihan pajak. Penerapan pemutihan pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan perolehan pajak. Tingginya kasus positif

---

<sup>46</sup> Aji, *Pengaruh Faktor Perilaku Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*, p. 16.

<sup>47</sup> Angga Munggara Harisman, 'Analisis Pengaruh Faktor Faktor Yang Melekat Pada Tax Payer (Wajib Pajak) Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).

<sup>48</sup> Martika Cahyani, 'Pengaruh Penerimaan SPPT, Moralitas Pajak, Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Badung', *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 9.1 (2018), 133–44.

<sup>49</sup> Darmakanti and Ema Sri Febriyanti, *Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi*, p. 93.

Covid-19 ditahun 2020-2021 menyebabkan berkurangnya aktivitas masyarakat Gunungpati karena pembatasan bekerja dan WFH untuk memotong rantai penularan covid-19. Akibatnya banyak usaha dan pekerjaan masyarakat tidak berjalan dengan efektif. Maka menjadi alasan mengapa sebagian wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya, yaitu karena berkurangnya pendapatan yang diterima bahkan terkena PHK<sup>50</sup>. Dengan adanya kebijakan pemutihan pajak diharapkan bisa menjadi alternatif yang dapat membantu meringankan wajib pajak dan menambah tingkat ketaatan wajib pajak. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan perpajakan.

Melalui kebijakan penghapusan denda pajak, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan kelonggaran bagi pembayar pajak. Berdasarkan teori Atribusi bahwa pemutihan pajak dikategorikan sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk taat membayar pajak. Hal ini berimplikasi bahwa tingkat penerimaan pajak akan meningkat karena semakin banyak orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membayar pajaknya. Hal ini berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak.

Menurut analisis Djolie pada 2019, pembebasan atau penghapusan denda PBB inilah yang menyebabkan peningkatan penerimaan pajak<sup>51</sup>. Program pemutihan pajak ini telah disosialisasikan melalui media sosial Bapenda Kota Semarang. Hasil penelitian Martalita Arti Hidayah dan Bambang Suryono (2022) menunjukkan bahwa dengan penghapusan denda pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kajian lain oleh Asianto Nugroho (2022) juga membuktikan pemutihan pajak berpengaruh pada optimalisasi target PBB<sup>52</sup>. Hal tersebut diakui oleh Pemerintah Kota Surakarta bahwa kebijakan *tax feedback* melalui strategi pemutihan dan pemberian undian hadiah sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk lebih cepat membayar pajak. Kemudian penelitian dari Idzni Widiyanti Agustin dkk (2021) memberi

---

<sup>50</sup> Darmakanti and Ema Sri Febriyanti, *Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi*, p. 93.

<sup>51</sup> Martalita Arti Hidayah and Bambang Suryono, 'Pengaruh Sppt, Sanksi Perpajakan, Dan Pemutihan Pbb Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb', 11.11 (2022).

<sup>52</sup> Asianto Nugroho, 'Model Tax Feedback Dalam Pemenuhan Optimalisasi Target Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kota Surakarta', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9.1 (2022), 469–80.

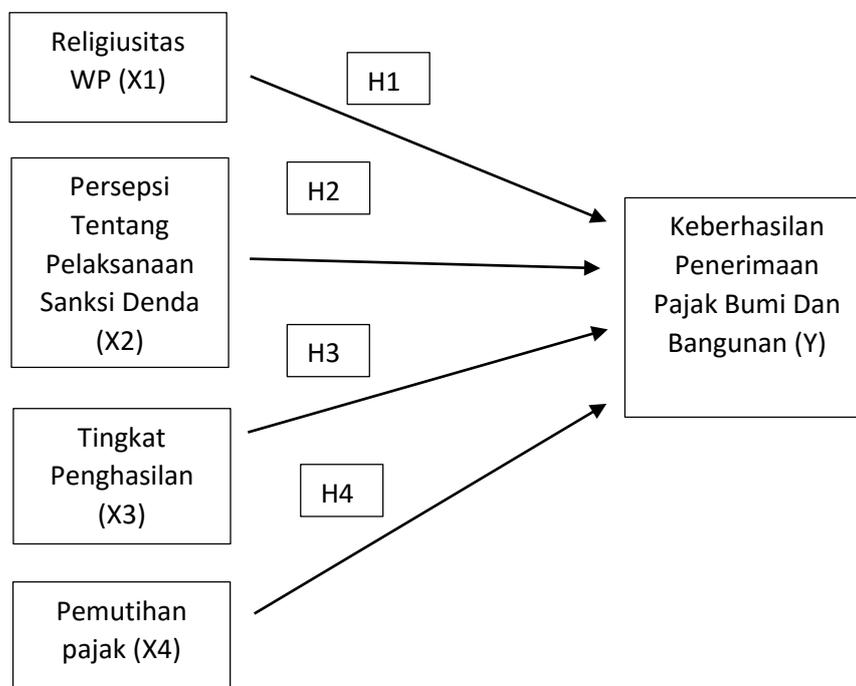
hasil bahwa pemutihan pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak PBB<sup>53</sup>. Namun, dalam literatur terdahulu belum ada penelitian yang menyatakan tentang berpengaruh atau tidaknya pemutihan pajak pada keberhasilan penerimaan PBB. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan variabel baru untuk mengetahui pengaruh pemutihan pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

Hipotesis dalam riset ini yang didukung oleh literatur sebelumnya adalah sebagai berikut:

#### **H4 Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB**

### **2.10 Kerangka Berfikir**

**Gambar 2. Kerangka Berfikir**



---

<sup>53</sup> Idzni Widiyanti Agustin, Yeti Apriawati, and Arry Irawan, 'Pengaruh Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kota Bandung', *Indonesian Accounting Research Journal*, 1.2 (2021), 271–79.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini dilakukan dengan menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel, sehingga dapat menemukan serta mengklarifikasi hasil penelitian sesuai dengan konsep teori dan fakta di lapangan. Penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen yaitu variabel religiusitas, persepsi tentang pelaksanaan sanksi denda, tingkat penghasilan, dan pemutihan pajak, sedangkan variabel dependennya yaitu keberhasilan penerimaan PBB. Menurut Creswell variabel-variabel tersebut diukur dengan instrumen-instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik<sup>54</sup>.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, populasi dimaksudkan sebagai objek yang mencakup benda-benda maupun individu-individu yang mempunyai jumlah dan ciri khusus yang diputuskan oleh peneliti guna diselidiki sehingga dapat ditarik kesimpulannya<sup>55</sup>. Sedangkan sampel mewakili representasi dari ukuran dan susunan populasi<sup>56</sup>. Sebanyak 53.964 wajib pajak PBB yang tercantum di kecamatan Gunungpati hingga tahun 2022 merupakan populasi dari penelitian ini. Pada penelitian ini teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah Probability Sampling, yaitu dengan memberi kesetaraan pada semua anggota populasi untuk ditunjuk sebagai anggota sampel. Sedangkan metode yang digunakan adalah *simple random sampling*. Margono mengartikan *simple random sampling* sebagai teknik pengambilan sampel langsung dari unit

---

<sup>54</sup> Dini Setyorini, Ety Nurhayaty, and Rosmita Rosmita, 'PENGARUH TRANSAKSI ONLINE (e-Commerce) TERHADAP PENINGKATAN LABA UMKM (Studi Kasus UMKM Pengolahan Besi Ciampea Bogor Jawa Barat)', *Jurnal Mitra Manajemen*, 3.5 (2019), 501–9 <<https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i5.228>>.

<sup>55</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan*, ed. by Safitri Yosita Ratri, 1st edn (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017).

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan*, p. 148.

sampling<sup>57</sup>. Dengan metode ini, sampel diambil secara acak dari anggota populasi tanpa memperhatikan strata pada populasi saat ini<sup>58</sup>.

Berdasarkan rumus Slovin dengan jumlah populasi sebanyak 53.964 wajib pajak yang aktif, taraf kesalahan diambil sebesar 10%, maka besarnya kuantitas sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Ket:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi sebesar 10%

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N e^2} \\ n &= \frac{53.964}{1 + (53.964 \times 10\%^2)} \\ n &= \frac{53.964}{1 + 539.64} \\ &= \frac{53.964}{540.64} \\ &= 99,81 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, hasil yang diperoleh sebesar 99,81 sehingga sampel dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 100 orang wajib pajak. Dalam tahap ini pengkajian sampel diambil secara acak tanpa kriteria tertentu. Dengan demikian setiap unit sampling akan memperoleh peluang yang setara sebagai sampel penelitian.

### 3.3 Pengukuran Variabel

Variabel dependen yaitu keberhasilan penerimaan PBB diukur dengan skala *likert* berdasarkan indikator dari Laily Fauziah (2008) yang terdiri dari 4 item pertanyaan. Sedangkan

---

<sup>57</sup> Tria Mei Diana, *STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI KONSTRUKSI EKONOMI 4.0 DI TINJAU MELALUI ANALISIS SWOT (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)*, Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang, 2015, iii.

<sup>58</sup> Diana, iii, *STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI KONSTRUKSI EKONOMI 4.0 DI TINJAU MELALUI ANALISIS SWOT (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)*, p. 23.

variabel independen religiusitas akan dinilai dengan menggunakan indikator dari Glock dan Stark (2005), yang akan diuji menggunakan skala likert dengan total 10 item pertanyaan. Persepsi tentang pelaksanaan sanksi denda akan dinilai menggunakan skala *likert* berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh Laily Fauziah (2008) sejumlah 4 item pertanyaan. Indikator Fitroh (2019) akan digunakan untuk mengukur variabel tingkat pendapatan yang akan diukur menggunakan skala likert dengan 6 item pertanyaan. Sedangkan variabel pemutihan pajak diukur menggunakan indikator yang dibuat oleh Wardani (2018) dengan skala likert yang dinilai dari 4 item pertanyaan. Pengukuran variabel diuji berdasarkan skala likert dengan bobot skor 1 sampai 5 dari masing-masing pertanyaan. Dengan keterangan bahwa nilai 1 : sangat tidak setuju dan nilai 5 : sangat setuju

Sangat tidak setuju  1  2  3  4  5 Sangat setuju

Bobot dari masing-masing penilaian :

**Tabel 3.1**

**Skor Skala Likert**

Skala Likert	Bobot
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Ragu	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

**3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian**

**Tabel 3.2**

**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Indikator Penelitian	Skala Pengukuran
Keberhasilan Penerimaan PBB (Y) Menurut Fauziah (2008) Keberhasilan penerimaan PBB adalah semua kegiatan perpajakan meliputi pemungutan, penagihan, pembayaran, penyetoran, pelimpahan serta	1. Kepatuhan pembayaran PBB 2. Kegiatan administrasi PBB  (Laily Fauziah, 2008)	Diukur melalui angket atau kuisisioner dengan penilaian menggunakan skala likert, skor 1-5 mulai dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga

pembagian hasil penerimaan PBB yang telah berhasil dilaksanakan <sup>59</sup> .		jawaban sangat setuju (SS).
Religiusitas Wajib Pajak (X1) merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, sehingga wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak <sup>60</sup> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keyakinan</li> <li>2. Praktik agama</li> <li>3. Penghayatan</li> <li>4. Pengetahuan agama</li> <li>5. Konsekuensi</li> </ol> <p>(Glock dan Stark, 2005)</p>	Diukur melalui angket atau kuisioner dengan penilaian menggunakan skala likert, skor 1-5 mulai dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).
Persepsi tentang pelaksanaan sanksi denda (X2) Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda adalah pandangan yang mengubah sikap perilaku wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Denda PBB</li> <li>2. Pelaksanaan PBB</li> </ol> <p>(Laily Fauziah, 2008)</p>	Diukur melalui angket atau kuisioner dengan penilaian menggunakan skala likert, skor 1-5 mulai dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).
Tingkat Penghasilan (X3) merupakan Kemampuan keuangan Wajib Pajak yang tercermin dari penghasilan per bulan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan wajib pajak yang diterima perbulan</li> <li>2. Pekerjaan wajib pajak</li> <li>3. Beban keluarga yang ditanggung oleh wajib pajak</li> </ol> <p>(Fitroh 2019)</p>	Diukur melalui angket atau kuisioner dengan penilaian menggunakan skala likert, skor 1-5 mulai dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).

<sup>59</sup> Muttaqin, *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, SPPT, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten*, p. 78.

<sup>60</sup> Tjandra Tirtono, Triani, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, p. 139.

<p>Pemutihan Pajak (X4) merupakan kebijakan penghapusan denda pajak yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sunset Policy: program pembebasan sanksi administrasi pajak</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak: hak dan kewajiban, kepercayaan masyarakat, dorongan dari diri sendiri.</li> </ol> <p>(Wardani, 2018)</p>	<p>Diukur melalui angket atau kuisioner dengan penilaian menggunakan skala likert, skor 1-5 mulai dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).</p>
---	---	---

### 3.5 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil survey wajib pajak yang tinggal di wilayah Kecamatan Gunungpati, dengan meninjau langsung pada kantor pelayanan PBB di Kecamatan Gunungpati. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan angket atau kuisioner kepada wajib pajak PBB, dimana wajib pajak memilih salah satu jawaban yang telah disediakan. Kuisioner ditujukan kepada wajib pajak yang tinggal di wilayah Kecamatan Gunungpati.

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif merupakan metode penganalisisan atau penggambaran umum tentang data sampel yang telah terkumpul. Tujuan metode ini agar data menjadi ringkas dan mudah dimengerti. Menurut Sholikhah yang menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistika yang dikerjakan dengan cara mengolah, menghimpun, dan mengatur data sehingga didapat gambaran tentang suatu kondisi pengambilan data secara jelas<sup>61</sup>. Gambaran umum tentang kuantitas data, mean, nilai maksimum dan minimum, rentang, standar deviasi, dan varian untuk setiap variabel disediakan oleh analisis statistik deskriptif. Dalam penelitian ini, tanggapan responden yang membahas tentang efek dari religiusitas, persepsi wajib pajak tentang pemberlakuan sanksi denda, tingkat pendapatan, dan pemutihan pajak terhadap keberhasilan

---

<sup>61</sup> Lilih Deva Martias, 'Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi', *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16.1 (2021), 40 <<https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>>.

penerimaan PBB diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil berupa angka tersebut dapat diinterpretasi secara langsung tanpa harus menarik sebuah kesimpulan.

### 3.6.2. Uji Validitas

Pengukuran instrument dikatakan valid jika instrument tersebut dapat mengukur *construct* sesuai dengan tujuan dan harapan peneliti<sup>62</sup>. Tujuan dari dilakukannya uji validitas adalah untuk mengukur ketepatan instrument penelitian dengan kata lain bahwa uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana item pertanyaan yang digunakan dapat menguji suatu model dalam penelitian ini. Suatu alat pengukur dapat dikatakan valid apabila mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dari kuesioner tersebut. Dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi untuk dapat dianggap memenuhi syarat adalah apabila hasil  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel atau nilai signifikansi  $\leq 0,1$ .

### 3.6.3. Uji Reliabilitas

Tujuan melakukan uji reliabilitas sebenarnya untuk mengevaluasi konsistensi alat ukur yang dipakai, yaitu dengan membaca akurasi, stabilitas, dan konsistensinya. Menurut Ghozali (2011) suatu kuesioner dikatakan *reliable* jika jawaban atas pertanyaan memiliki tingkat konsistensi yang teratur atau stabil, maka kuesioner tersebut dianggap dapat diandalkan<sup>63</sup>. Untuk menentukan reliabilitas instrumen dapat dilihat dari *cronbach alpha* setiap instrument variabel. Variabel tersebut diindikasikan *reliable* jika *cronbach alpha* mempunyai nilai yang lebih dari 0,60<sup>64</sup>. Apabila perhitungan menunjukkan nilai tersebut maka dapat dikatakan kuesioner tersebut dapat diandalkan dan layak untuk digunakan dalam penelitian.

### 3.6.4. Uji Asumsi Klasik

#### 3.6.4.1 Uji Normalitas

Dilakukan uji normalitas tujuannya agar model regresi dapat dilihat apakah data variabel bebas dan terikat terdistribusi secara teratur atau tidak<sup>65</sup>. Model regresi dikatakan baik apabila memiliki persamaan yang distribusi datanya mendekati normal bahkan sangat normal. Untuk menentukan apakah

---

<sup>62</sup> Fauziah, *Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pbb (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pbb Jakarta Selatan Satu)*, p. 53.

<sup>63</sup> Putri Dwi Utari, 'Pengaruh Kesadaran, Tax Amnesty Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Bidang Pendidikan', 2017.

<sup>64</sup> Fauziah, *Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pbb (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pbb Jakarta Selatan Satu)*, p. 53.

<sup>65</sup> Fauziah, *Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pbb (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pbb Jakarta Selatan Satu)*, p. 54.

data terdistribusi secara normal atau tidak dapat dilakukan pengujian dua metode yaitu uji statistik non-parametrik *Kolmogorov Smirnov* dan uji P-P Plot untuk grafik normal. Pengambilan keputusan didasarkan pada:

1. Data dapat dikatakan berdistribusi secara normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05.
2. Data dapat dianggap tidak berdistribusi normal jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05.
3. Model regresi memenuhi asumsi normalitas jika penyebaran datanya berada di sekeliling garis normal dan pergerakannya mengikuti arah garis diagonal, atau jika histogram memperlihatkan pola distribusi normal.
4. Model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas jika penyebaran datanya jauh dari garis diagonal, mengikuti garis diagonal, atau tidak menunjukkan pola terdistribusi normal pada grafik histogram<sup>66</sup>.

#### **3.6.4.2 Uji Multikolinieritas**

Model regresi jika dapat mendeteksi adanya korelasi yang kuat antar variabel independen, maka dinyatakan lulus uji multikolinieritas. Multikolinieritas digunakan dalam analisis regresi berganda yang memiliki dua atau lebih variabel independen. Model regresi yang tidak terjadi korelasi antara variabel independen dapat dikatakan baik. Ketika variabel independen dan dependen dalam model regresi menunjukkan korelasi timbal balik, maka variabel ini dikatakan non-ortogonal, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut nilainya nol<sup>67</sup>. VIF (Variance Inflation Factor) yang nilainya tidak lebih besar dari 10 dan nilai tolerance tidak lebih rendah dari 0,1 dapat dipakai dalam menentukan ada tidaknya gejala multikolinieritas<sup>68</sup>.

#### **3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas**

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah mengetahui apakah terdapat kesamaan varian dari residual observasi satu ke observasi lain dalam suatu

---

<sup>66</sup> Fauziyah, *Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pbb (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pbb Jakarta Selatan Satu)*, p. 54.

<sup>67</sup> Fauziyah, *Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pbb (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pbb Jakarta Selatan Satu)*, p. 55.

<sup>68</sup> Fauziyah, *Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pbb (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pbb Jakarta Selatan Satu)*, p. 55.

regresi<sup>69</sup>. Jika varians dari residual pengamatan tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika varians itu berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi dinyatakan baik ketika tidak terjadi heteroskedastisitas<sup>70</sup>. Dalam penelitian ini pengujian heterokedastisitas menggunakan grafik *scatter plot* dan uji glejser<sup>71</sup>. Dalam pengujian grafik *scatter plot*, terjadi atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dilihat dari titik yang menyebar pada grafik. Menurut Santoso menyimpulkan bahwa titik-titik yang persebarannya secara acak ataupun tidak membentuk pola khusus, serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dianggap tidak terjadi heterokedastisitas. Tetapi jika titik-titik tersebut berbentuk pola yang teratur, maka dianggap terjadi heterokedastisitas<sup>72</sup>. Sedangkan pada uji glejser apabila nilai Sig. variabel independen bernilai > 0,05, maka data dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

### 3.6.5 Pengujian Hipotesis

#### 3.6.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda diperlukan untuk memberikan bukti sekuat apa religiusitas, persepsi wajib pajak, tingkat penghasilan dan pemutihan pajak dapat mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB. Dengan adanya minimal dua variabel independen sebagai indikator, analisis regresi berganda bertujuan agar dapat mengetahui kondisi (naik turunnya) variabel dependen. Analisis ini dipakai dengan mengaitkan empat variabel independen (X1, X2, X3, X4) dan variabel dependen (Y). Persamaan regresinya sebagai berikut:  $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$

Dimana :

Y = Variabel dependen (keberhasilan penerimaan PBB)

a = Bilangan berkonstanta

---

<sup>69</sup> Utari, *Pengaruh Kesadaran, Tax Amnesty dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Bidang Pendidikan*, p. 33.

<sup>70</sup> Fauziyah, *Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pbb (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pbb Jakarta Selatan Satu)*, p. 55.

<sup>71</sup> Fauziyah, *Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pbb (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pbb Jakarta Selatan Satu)*, p. 55.

<sup>72</sup> Fauziyah, *Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pbb (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pbb Jakarta Selatan Satu)*, p. 55.

b1= koefisien arah garis

X1 = variabel bebas X1 (religiusitas WP)

X2 = variabel bebas X2 (persepsi WP)

X3 = variabel bebas X3 (tingkat penghasilan)

X4 = variabel bebas X4 (pemutihan pajak)

### **3.6.5.2 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)**

Mendeteksi keterkaitan antara tiap-tiap variabel independen pada variabel dependen dapat diperiksa menggunakan uji statistik t-test. Variabel independen akan berdampak pada variabel dependen jika angka probabilitas suatu variabel kurang dari 0,05 dan angka t hitungnya melebihi angka t tabel<sup>73</sup>. Dalam hal ini keputusan diambil dengan mempertimbangkan dasar:

1. Nilai signifikansi bila kurang dari 0,05 atau  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ , maka dianggap bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Nilai signifikansi bila lebih dari 0,05 atau  $t_{hitung}$  kurang dari  $t_{tabel}$ , maka dianggap bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

### **3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji ini dipakai untuk melihat seberapa kuatnya keterpengaruhan variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat. Dikatakan fluktuasi apabila R-square bernilai 1. Pada dasarnya ini membuktikan jika variabel dependen keterpengaruhannya disebabkan oleh variabel independen dan tidak dipengaruhi oleh unsur lain yang menyebabkan instabilitas variabel dependen<sup>74</sup>. Menurut Ghozali (2001), jika nilai R-square berkisar 0 sampai 1, maka kekuatan variabel independen untuk menerangkan perubahan variabel dependen semakin besar. Sedangkan, jika hasil R-square mendekati 0 dipastikan ketepatan variabel

---

<sup>73</sup> Darmawan, *Analisis Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang*, p. 50.

<sup>74</sup> Fauziyah, *Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pbb (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pbb Jakarta Selatan Satu)*, P. 56.

independen untuk menjelaskan perubahan variabel dependen semakin melemah<sup>75</sup>.

#### **3.6.5.4 Uji Simultan F**

Untuk menilai apakah masing-masing variabel independen berpengaruh pada variabel dependen, maka dilakukanlah pengujian simultan F. Dapat diasumsikan bahwa semua faktor independen mempengaruhi variabel dependen jika nilai F lebih dari 5 atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Namun sebaliknya, dinyatakan variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen apabila nilai F lebih kecil dari 0,05 atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

---

<sup>75</sup> Fauziah, *Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pbb (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pbb Jakarta Selatan Satu)*, p. 57.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Kecamatan Gunungpati**

Berdasarkan letak geografisnya, kecamatan Gunungpati merupakan bagian dari wilayah selatan Kota Semarang. Wilayah ini memiliki luas sebesar 5.399,085 hektar yang dipecah menjadi 16 kelurahan, 97 RW dan 501 RT. Batas wilayahnya meliputi Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Ngaliyan disisi utara, Kabupaten Semarang disisi selatan, Kecamatan Banyumanik dan Kabupaten Semarang disisi timur, serta Kecamatan Mijen dan Kabupaten Kendal disisi barat.

Posisi kecamatan Gunungpati berada dibawah kaki Gunung Ungaran dengan ketinggian 259 meter. Gunungpati dengan potensi curah hujan rata-rata sebesar 1,853 mm/bulan menjadikan udara di daerah ini relatif sejuk dan termasuk wilayah dataran tinggi di wilayah Kota Semarang. Tanahnya memiliki tingkat kesuburan yang baik sehingga mendukung untuk ditanami aneka macam sayur atau buah-buahan. Penduduk Gunungpati yang berjumlah 97.691 jiwa rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani, pedagang, wiraswasta dll.

##### **4.1.2 Visi dan Misi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang dimana visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah mengikuti visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

###### **1. Visi**

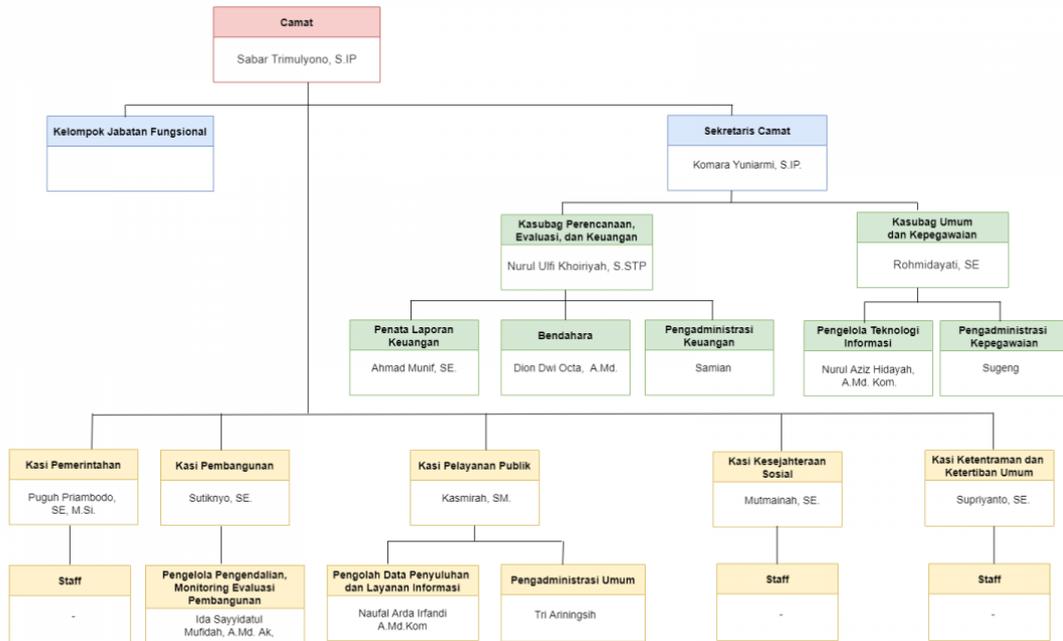
Semarang kota perdagangan dan jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera.

###### **2. Misi**

- a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
- b. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik
- c. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan
- d. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif

### 4.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Gunungpati

**Gambar 3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG**



Struktur atau susunan organisasi Kecamatan Gunungpati terdiri dari:

- a. Camat : Sabar Trimulyono, S.IP
- b. Sekretaris Camat : Komara Yuniarmi, S.IP
  1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan : Nurul Ulfi Khoiriyah, S.STP
    - Penata Laporan Keuangan : Ahmad Munif, SE.
    - Bendahara : Dion Dwi Octa, A.Md
    - Pengadministrasi Keuangan : Samian
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Rohmidayati, SE.
    - Pengelola Teknologi Informasi : Nurul Aziz Hidayah, A.Md. Kom.
    - Pengadministrasi Kepegawaian : Sugeng
- c. Kasi Pemerintahan : Puguh Priambodo, SE, M.Si.
- d. Kasi Pembangunan : Sutiknyo, SE.
- e. Kasi Pelayanan Publik : Kasmirah, SM.
- f. Kasi Kesejahteraan Sosial : Mutmainah, SE.
- g. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Supriyanto, SE.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

## 4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

Pengambilan sampel dalam riset ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada wajib pajak di Kecamatan Gunungpati. Sebanyak 100 sampel diperlukan guna menguji hipotesis dalam riset ini. Sebelumnya uji instrument telah dilakukan dengan mengambil sebanyak 20 sampel wajib pajak dari 100 sampel yang diperlukan. Setelah instrumen diuji dan menghasilkan data yang valid dan reliabel, tahap selanjutnya adalah menyebar kuesioner yang kedua untuk melengkapi 100 sampel yang diperlukan. Variabel bebas yang dipakai dalam riset ini adalah religiusitas, persepsi wajib pajak, tingkat penghasilan, dan pemutihan pajak. Sedangkan keberhasilan penerimaan PBB sebagai variabel terikatnya.

Dalam penelitian ini untuk membantu memahami temuan penelitian, kepribadian responden diperlukan untuk memberikan gambaran situasi responden sebagai sumber informasi tambahan. Dalam situasi ini, pendeskripsian data digunakan untuk menilik profil responden dan menganalisis korelasi antar variabel penelitian. Karakteristik penelitian tersebut meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan responden. Uraian berikut berasal dari penelitian yang dilakukan terhadap 100 responden dan didapat gambaran sebagai berikut:

### 4.2.1 Jenis Kelamin Responden

Bersandarkan informasi yang didapat dari pembagian kuesioner pada wajib pajak Kecamatan Gunungpati, ada dua pengkategorian jenis kelamin responden, yaitu laki-laki dan perempuan dengan persentase sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

#### **Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Responden	Persentase (%)
Laki-laki	41	41%
Perempuan	59	59%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Tabel 4.1 memperlihatkan wajib pajak yang bergender laki-laki dalam penelitian ini sebanyak 41 orang dengan persentase sebesar 41%, sedangkan wajib pajak yang bergender perempuan sejumlah 59 orang dengan persentase 59%. Maka dapat dipastikan bahwa responden yang membayar pajak di Kecamatan Gunungpati lebih didominasi perempuan dibandingkan laki-laki.

#### 4.2.2 Usia Responden

Dalam kuesioner penelitian, batasan usia responden terbagi menjadi 3 kategori yaitu, kategori usia 25-39 tahun, usia 40-59 tahun, dan usia 60 tahun keatas. Informasi dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Klasifikasi Berdasarkan Usia**

Usia	Responden	Persentase
25-39 th	52	52%
40-59 th	45	45%
>60 th	3	3%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel dalam penelitian ini wajib pajak dengan usia 25 sampai 39 tahun diketahui berjumlah 52 responden dengan persentase sebesar 52%. Ada 45 responden atau sebesar 45% merupakan wajib pajak yang berusia antara 40 sampai 59 tahun. Kemudian ada 3 responden yang berusia lebih dari 60 tahun dengan persentase sebesar 3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata usia wajib pajak di Kecamatan Gunungpati dominan antara usia 25 sampai dengan 39 tahun. Dengan demikian sebagian besar masyarakat Kecamatan Gunungpati yang menjadi wajib pajak dianggap masih berusia produktif, atau antara usia 25 sampai 59 tahun.

#### 4.2.3 Pendidikan Responden

Dalam kuesioner penelitian, data pendidikan terakhir responden dibagi menjadi enam kategori dalam angket penelitian, yaitu; SD, SMP, SMA, D1-D3, S1-S3, dan alternatif lain untuk jenjang pendidikan yang lain. Perolehan informasi dari penelitian ini diketahui sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan	Responden	Persentase
SD	10	10%
SMP	15	15%
SMA	43	43%
D1-D3	10	10%
S1-S3	19	19%

Lain-lain	3	3%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, terlihat bahwa 10 responden dengan presentase sebesar 10% dalam survei ini merupakan tamatan pendidikan SD. Jumlah wajib pajak berdasarkan tamatan SMP sejumlah 15 responden dengan persentase sebesar 15%. Jumlah wajib pajak dengan tamatan pendidikan SMA diketahui sebanyak 43 responden dengan persentase sebesar 43%. Jumlah wajib pajak dengan tamatan pendidikan D1-D3 sebesar 10 responden dengan persentase senilai 10%. Wajib pajak dengan tamatan pendidikan S1-S3 sebanyak 19 responden dengan tingkat persentase sebesar 19%. Sisanya sebesar 3% merupakan responden yang tidak tamat pada pendidikan SD.

#### 4.2.4 Pekerjaan Responden

Dalam kuesioner penelitian ini informasi tentang profesi responden terbagi dalam 5 jenis yaitu, PNS, petani, buruh, karyawan swasta, dan opsi tambahan untuk pekerjaan lain. Mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka rincian jenis profesi ada dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Klasifikasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Pekerjaan	Responden	Persentase
Petani	1	0%
PNS	15	5%
Buruh	12	25%
Karyawan swasta	36	40%
Lain-lain	36	30%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa persentase wajib pajak Gunungpati yang berprofesi sebagai petani adalah 1% atau 1 responden. Wajib pajak yang berprofesi menjadi PNS ada 15 responden dengan persentase sebesar 15%. Wajib pajak dengan profesi sebagai buruh berjumlah 12 responden dengan tingkat persentase sebesar 12%. Wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan swasta berjumlah 36 responden dengan persentase sebesar 36%. Sebagian lainnya tersisa 36 responden dengan persentase sebesar 36% merupakan wajib pajak yang kesehariannya antara lain sebagai wirausaha

(pedagang), ibu rumah tangga, tenaga kerja kontrak, dan pensiunan TNI. Hal ini membuktikan bahwa pada umumnya masyarakat di Gunungpati didominasi berprofesi sebagai karyawan swasta. Sedangkan masyarakat yang berprofesi sebagai petani kini sudah sangat sedikit. Padahal dilihat dari kondisi lapangannya Gunungpati termasuk wilayah dataran tinggi. Faktor yang menyebabkan kondisi tersebut tidak lain adalah untuk memenuhi biaya kebutuhan keluarga, karena jika menggantungkan hasil dari pertanian penghasilan tidak selalu pasti. Maka dari itu Gunungpati termasuk wilayah peralihan lapangan kerja yang semula masyarakatnya berprofesi sebagai petani kini beralih profesi ke bidang lainnya.

### 4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan dari data yang didapat sebagaimana adanya, analisis statistik deskriptif digunakan ketika akan menentukan secara lugas arti dari setiap variabel berupa mean, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Analisis deskriptif akan digunakan untuk menilai jawaban responden terhadap pertanyaan tentang pengaruh religiusitas, persepsi tentang pelaksanaan sanksi denda, tingkat pendapatan, pemutihan pajak, dan keberhasilan penerimaan PBB. Hasilnya ditampilkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Uji Statistik Deskriptif**

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
RELIGIUSITAS	100	22,00	28,00	50,00	40,9900	5,07618	25,768
PERSEPSI	100	13,00	7,00	20,00	14,9100	2,35314	5,537
PENGHASILAN	100	18,00	11,00	29,00	20,1300	3,69180	13,629
PEMUTIHAN	100	10,00	10,00	20,00	16,0000	1,93845	3,758
PENERIMAAN	100	10,00	10,00	20,00	15,5700	2,23044	4,975
Valid N (listwise)	100						

*Sumber : diolah dengan SPSS 21*

Dari tabel 4.5, berikut ini adalah penjelasan rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel:

a. Religiusitas (X1)

Berdasarkan output uji statistik deskriptif variabel religiusitas menunjukkan nilai mean sebesar 40,99, standar deviasi sebesar 5,076, nilai variance sebesar 25,768, rangenya sebesar 22,00, nilai maksimumnya sebesar 50,00, dan nilai minimumnya sebesar 28,00.

b. Persepsi Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda (X2)

Berdasarkan output uji statistik deskriptif variabel persepsi wajib pajak menunjukkan nilai meannya sebesar 14,91, standar deviasi sebesar 2,353, nilai variance sebesar 5,537, rangenya sebesar 13,00, nilai maksimumnya sebesar 20,00, dan nilai minimumnya sebesar 7,00.

c. Tingkat Penghasilan (X3)

Berdasarkan output uji statistik deskriptif variabel tingkat penghasilan menunjukkan nilai meannya sebesar 20,13, standar deviasi sebesar 3,691, nilai variance sebesar 13,629, rangenya sebesar 18,00, nilai maksimumnya sebesar 29,00, dan nilai minimumnya sebesar 11,00.

d. Pemutihan Pajak (X4)

Berdasarkan output uji statistik deskriptif variabel pemutihan pajak menunjukkan nilai mean sebesar 16,00, standar deviasi sebesar 1,938, nilai variance sebesar 3,758, rangenya sebesar 10,00, nilai maksimumnya sebesar 20,00, dan nilai minimumnya sebesar 10,00.

e. Keberhasilan Penerimaan Pajak (Y)

Berdasarkan output uji statistik deskriptif variabel keberhasilan penerimaan PBB menunjukkan nilai mean sebesar 15,570, standar deviasi sebesar 2,230, nilai variance sebesar 4,975, rangenya sebesar 10,00, nilai maksimumnya sebesar 20,00, dan nilai minimumnya sebesar 10,00.

#### 4.4 Analisis Data

##### 4.4.1 Uji Validitas

Bilamana ingin mengetahui valid atau tidaknya sebuah kuesioner dalam penelitian maka dapat dilakukan dengan uji validitas. Jika kuesioner mampu mengukur data yang dimaksud, maka kuesioner tersebut dianggap valid. Indikator pada kuesioner dianggap valid apabila nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Untuk mengukur  $r_{hitung}$ , peneliti dibantu dengan alat SPSS versi 21 sedangkan  $r_{tabel}$  diketahui dari tabel yang telah ditentukan dengan menghitung dahulu derajat kebebasannya (*Degree of freedom*).

Untuk menentukan derajat kebebasan dihitung menggunakan rumus ( $df = N-2$ ). Besarnya  $df$  dengan alpha 0,05 (5%), dimana  $N$  merupakan jumlah responden, sehingga  $df = 100 - 2 = 98$ . Maka didapat  $r_{tabel}$  sebesar 0,196. Sebagaimana dilampirkan hasil ujinya dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item Pertanyaan	R <sub>hitung</sub>	R <sub>tabel</sub>	Keterangan
Religiusitas	X1.1	0,681	0,196	Valid
	X1.2	0,629	0,196	Valid
	X1.3	0,693	0,196	Valid
	X1.4	0,683	0,196	Valid
	X1.5	0,567	0,196	Valid
	X1.6	0,749	0,196	Valid
	X1.7	0,767	0,196	Valid
	X1.8	0,676	0,196	Valid
	X1.9	0,662	0,196	Valid
	X1.10	0,717	0,196	Valid
Persepsi Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda	X2.1	0,797	0,196	Valid
	X2.2	0,773	0,196	Valid
	X2.3	0,513	0,196	Valid
	X2.4	0,606	0,196	Valid
Tingkat Penghasilan	X3.1	0,712	0,196	Valid
	X3.2	0,402	0,196	Valid
	X3.3	0,632	0,196	Valid
	X3.4	0,636	0,196	Valid
	X3.5	0,662	0,196	Valid
	X3.6	0,557	0,196	Valid
Pemutihan Pajak	X4.1	0,697	0,196	Valid
	X4.2	0,624	0,196	Valid
	X4.3	0,729	0,196	Valid
	X4.4	0,765	0,196	Valid
Keberhasilan Penerimaan PBB	Y.1	0,733	0,196	Valid
	Y.2	0,650	0,196	Valid
	Y.3	0,787	0,196	Valid
	Y.4	0,803	0,196	Valid

*Sumber : diolah dengan SPSS 21*

Dilihat dari hasil pengujian pada tabel diatas artinya pertanyaan dalam kuesioner dengan variabel Religiusitas ( $X_1$ ), Persepsi Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda ( $X_2$ ), Tingkat Penghasilan ( $X_3$ ), Pemutihan Pajak ( $X_4$ ), dan Keberhasilan Penerimaan PBB ( $Y$ ) di Kecamatan Gunungpati dinyatakan valid dimana keseluruhan butir pertanyaan nilainya memenuhi syarat  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,196).

#### **4.4.2 Uji Reliabilitas**

Tujuan pengujian reliabilitas adalah sebagai bahan penilaian seberapa konsisten jawaban responden saat menjawab pertanyaan pada setiap variabel. Uji statistik *Cronbach Alpha Coefficient* ( $\alpha$ ) dipakai untuk mengukur tingkat reliabilitas dalam

penelitian ini. Jika skor *Cronbach Alpha* kuesioner lebih tinggi dari 0,60 maka kuesioner tersebut dipastikan reliabel atau andal. Tabel berikut memperlihatkan hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach Alpha Coefficient</i>	Keterangan
Religiusitas	0,870	Reliabel
Persepsi Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda	0,613	Reliabel
Tingkat Penghasilan	0,640	Reliabel
Pemutihan Pajak	0,652	Reliabel
Keberhasilan Penerimaan PBB	0,729	Reliabel

*Sumber : diolah dengan SPSS 21*

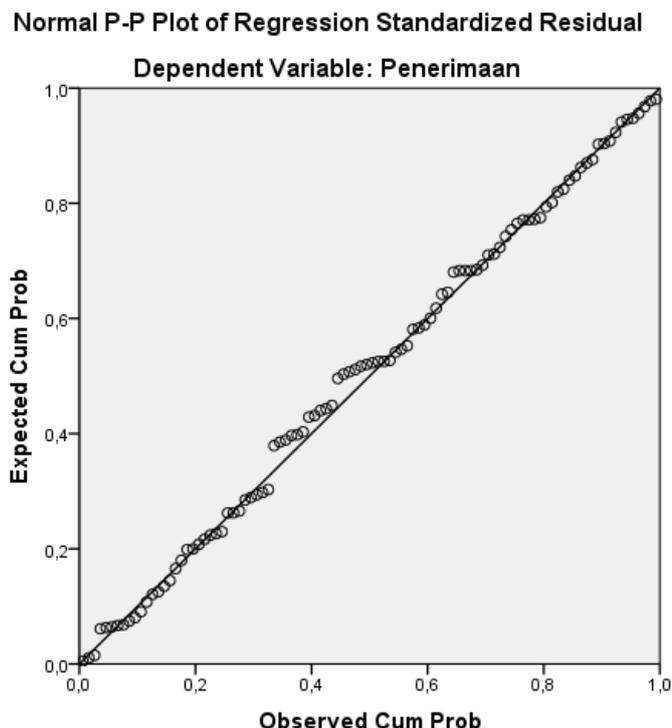
Berdasarkan uji reliabilitas diatas, dinyatakan bahwa seluruh nilai *Cronbach Alpha* lebih tinggi dari 0,60 dan berkisar antara 0,613 hingga 0,870. Maka dapat dipastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner penelitian ini telah reliabel.

#### 4.5 Uji Asumsi Klasik

##### 4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menilai sebaran data variabel bebas dan terikat dalam model regresi, apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Uji grafik normal P-P plot dan uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan uji normalitas. Hasil dari uji grafik normal P-P plot terlihat dalam gambar berikut:

**Gambar 4.**  
**Grafik Normalitas Probability Plot**



Pada grafik diatas, titik-titik terlihat menyebar disekeliling garis diagonal dan arahnya teratur. Menunjukkan bahwa data penelitian tersebut terdistribusi secara normal dan tidak tersebar terlalu jauh dari garis lurus. Selain itu, model uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov* digunakan untuk memperkuat pengujian normalitas probability plot. Hasil uji menggunakan *One-Sample Kolmogorov Smirnov* dipaparkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.8**  
**Uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov***

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,75581158
Most Extreme Differences	Absolute	,056
	Positive	,031
	Negative	-,056
Kolmogorov-Smirnov Z		,558
Asymp. Sig. (2-tailed)		,915

*Sumber : diolah dengan SPSS 21*

Saat melakukan uji normalitas *One-Sample Kolmogorov Smirnov*, data dianggap berdistribusi normal jika nilai probabilitas (sig.) > 0,05. Menurut tabel diatas nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dari penelitian ini adalah 0,915. Temuan ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi secara normal.

#### 4.5.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas diperlukan untuk menilai korelasi antar variabel independen. Semakin besar standar kesalahan yang disebabkan oleh gejala multikolinieritas, maka akan memungkinkan terjadinya interpretasi yang bias. Model regresi dianggap bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih rendah dari 10. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji multikolinearitas:

**Tabel 4.9**  
**Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 RELIGIUSITAS	,734	1,363
PERSEPSI	,781	1,280
PENGHASILAN	,804	1,243
PEMUTIHAN	,796	1,256

Sumber : diolah dengan SPSS 21

Sesuai dengan tabel hasil pengujian diatas, pada variabel religiusitas nilai tolerance dan nilai VIF masing-masing adalah 0,734 dan 1,363. Nilai tolerance dan VIF untuk variabel persepsi tentang pelaksanaan sanksi denda berturut-turut adalah 0,781 dan 1,280. Nilai tolerance dan VIF untuk variabel tingkat penghasilan masing-masing adalah 0,804 dan 1,243. Nilai tolerance dan VIF untuk variabel pemutihan pajak masing-masing adalah 0,796 dan 1,256. Pada penelitian ini, setiap variabel independen mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF lebih rendah dari 10. Dapat dikatakan bahwa keempat variabel independen pada penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas.

#### 4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

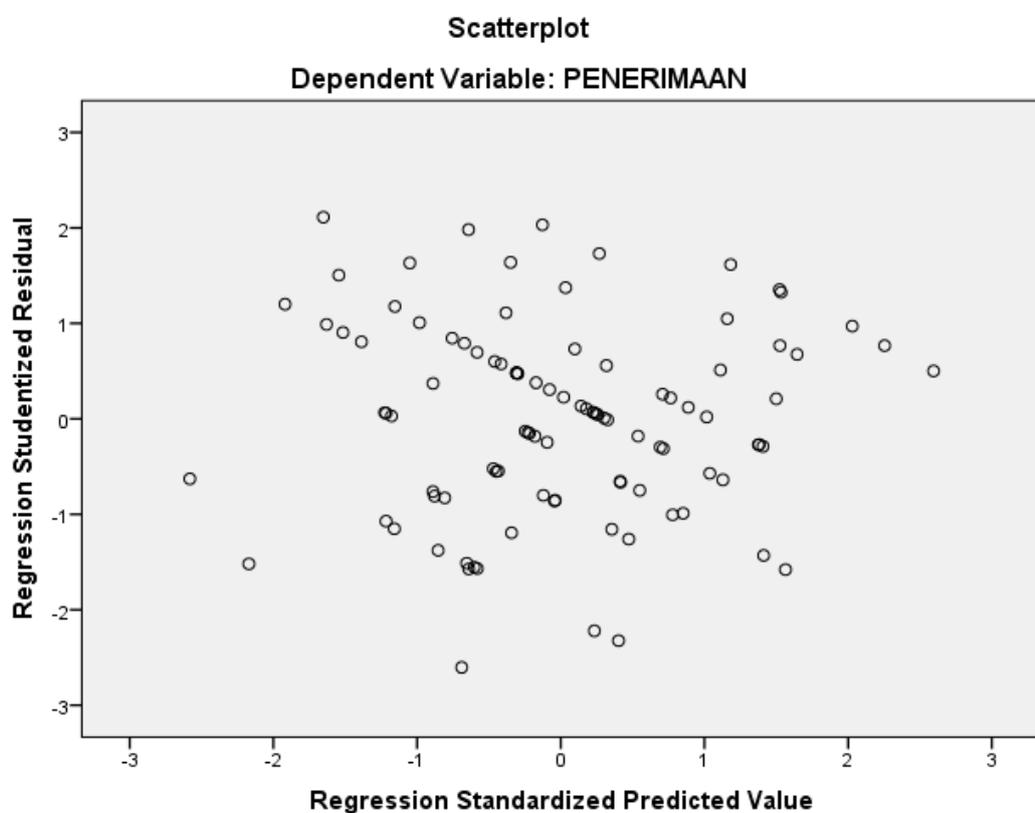
Uji heterokedastisitas dilakukan untuk memeriksa apakah model regresi terjadi kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain<sup>76</sup>. Model

<sup>76</sup> Utari, *Pengaruh Kesadaran. Tax Amnesty...*, p. 33.

regresi dikatakan baik apabila memiliki varians yang sama (homokedastisitas), atau tidak mengalami gejala heteroskedastisitas<sup>77</sup>.

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dinilai menggunakan uji *scatter plot* dan uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan uji *scatter plot* adalah titik-titik tersebar secara acak, tidak membentuk pola khusus, dan tersebar diatas atau dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sedangkan jika nilai Sig. variabel bebas yang dihasilkan melebihi 0,05 maka dianggap tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada gambar dibawah ini menyajikan pengujian scatter plot:

**Gambar 5. Grafik Scatter Plot**



Berdasarkan gambar diatas, penyebaran data terjadi disekeliling titik-titik nol dan tidak membentuk pola yang jelas. Regresi dalam pengujian ini dapat dikatakan tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Uji Glejser digunakan untuk mengkonfirmasi temuan penelitian ini, dan hasilnya dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>77</sup> Elisha Martha Hanum Basyaroh, 'Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Sanksi Perpajakan, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

**Tabel 4.10**  
**Uji Glejser**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,653	1,103		2,405	,018
RELIGIUSITAS	,003	,024	,017	,144	,886
1 PERSEPSI	,032	,050	,071	,632	,529
PENGHASILAN	-,059	,032	-,205	-1,849	,068
PEMUTIHAN	-,043	,061	-,080	-,716	,476

Sumber : diolah dengan SPSS 21

Berdasarkan pada tabel uji Glejser diatas menunjukkan bahwa variabel religiusitas dengan nilai Sig. sebesar 0,886 yang artinya melebihi 0,05. Variabel persepsi tentang pelaksanaan sanksi denda dengan nilai Sig. sebesar 0,529 dimana angka tersebut nilainya juga melebihi 0,05. Variabel tingkat penghasilan memiliki nilai Sig. sebesar 0,068 dimana angka tersebut nilainya lebih tinggi dari 0,05. Variabel pemutihan pajak memiliki nilai Sig. sebesar 0,476 yang berarti nilai tersebut lebih banyak dari 0,05.

Pada penelitian ini nilai Sig. keempat variabel independen melebihi 0,05. Hasil ini memperoleh kesimpulan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak menunjukkan masalah heteroskedastisitas karena seluruhnya memenuhi kriteria nilai Sig > 0,05.

## 4.6 Uji Hipotesis

### 4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis berguna untuk memvalidasi kebenaran hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian. Hipotesis tersebut mengarah pada keterkaitan religiusitas, persepsi tentang pelaksanaan sanksi denda, tingkat penghasilan, dan pemutihan pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji hipotesis dengan bantuan program SPSS versi 21.0, sehingga dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	2,144	1,895		1,131	,261
1	RELIGIUSITAS	,111	,041	,253	2,679	,009
	PERSEPSI	-,047	,087	-,049	-,537	,593
	PENGHASILAN	,123	,054	,204	2,266	,026
	PEMUTIHAN	,443	,104	,385	4,253	,000

Sumber : diolah dengan SPSS 21

Berdasarkan temuan uji regresi linier berganda yang diperlihatkan pada tabel di atas, didapat sebuah persamaan untuk menggambarkan hubungan antara variabel dependen keberhasilan penerimaan PBB dengan variabel independen religiusitas, persepsi tentang pelaksanaan sanksi denda, tingkat penghasilan, dan pemutihan pajak. Dapat diilustrasikan melalui persamaan berikut:

$$Y = 2,144 + 0,111 X_1 - 0,047 X_2 + 0,123 X_3 + 0,443 X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta diketahui sebesar 2,144. Hasil ini menunjukkan apabila variabel religiusitas, persepsi tentang pelaksanaan sanksi denda, tingkat penghasilan, dan pemutihan pajak nilainya nol, maka nilai konstanta dapat menaikkan keberhasilan penerimaan PBB nilainya sebesar 2,144.
2. Nilai koefisien regresi variabel Religiusitas (X<sub>1</sub>) sebesar 0,111 dengan arah positif. Hasil yang sama terjadi jika variabel-variabel independen yang lain sifatnya konstan, maka setiap kenaikan religiusitas sebesar 0,01 satuan akan diikuti dengan kenaikan nilai keberhasilan penerimaan pajak sebesar 0,111 satuan.
3. Nilai koefisien regresi variabel Persepsi Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda (X<sub>2</sub>) diketahui sebesar 0,047 dengan arah negatif. Hasil yang berbeda jika variabel-variabel independen lainnya bersifat konstan, maka setiap kenaikan persepsi sebesar 0,01 satuan akan diikuti dengan penurunan nilai keberhasilan penerimaan pajak sebesar 0,047 satuan.

4. Nilai koefisien regresi variabel Tingkat Penghasilan (X3) sebesar 0,123 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat pendapatan sebesar 0,01 satuan akan diikuti dengan kenaikan nilai keberhasilan penerimaan pajak sebesar 0,123 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain bersifat konstan.
5. Nilai koefisien regresi variabel Pemutihan Pajak (X4) sebesar 0,443 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan penghapusan pajak sebesar 0,01 satuan akan diikuti dengan peningkatan nilai keberhasilan penerimaan pajak sebesar 0,443 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya bersifat konstan.

#### 4.6.2 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Untuk memastikan bagaimana setiap variabel independen (parsial) berhubungan dengan variabel dependen, maka dilakukan uji koefisien regresi parsial atau uji t statistik. Uji ini dilakukan untuk menentukan kebenaran suatu hipotesis penelitian. Variabel independen dikatakan memiliki efek pada variabel dependen jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 dan nilai t hitung melebihi nilai t tabel. Dasar pengambilan keputusannya, yakni:

1. Apabila nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05 atau  $t_{hitung}$  melebihi  $t_{tabel}$ , maka terjadi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi melebihi 0,05 atau  $t_{hitung}$  lebih rendah dari  $t_{tabel}$ , maka variabel independen tidak memiliki dampak pada variabel dependen.

Untuk menentukan  $t_{tabel}$  menggunakan rumus  $df = n - k - 1$ , dimana n adalah jumlah data dan k adalah variabel bebas. Jadi  $df = 100 - 4 - 1 = 95$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Maka diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,985.

**Tabel 4.12**  
**Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2,144	1,895		1,131	,261
	RELIGIUSITAS	,111	,041	,253	2,679	,009
	PERSEPSI	-,047	,087	-,049	-,537	,593
	PENGHASILAN	,123	,054	,204	2,266	,026

PEMUTIHAN	,443	,104	,385	4,253	,000
-----------	------	------	------	-------	------

Sumber : diolah dengan SPSS 21

Berdasarkan output pengujian dengan SPSS, maka hasil data dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Keberhasilan penerimaan PBB secara positif signifikan dipengaruhi oleh variabel religiusitas. Dalam tabel diatas variabel religiusitas menunjukkan nilai Sig. dengan hasil  $0,009 < 0,05$ . Sedangkan t hitung diperoleh nilai 2,679. Dalam hal ini  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (1,985), maka disimpulkan bahwa pernyataan H1 diterima, sehingga religiusitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Dengan demikian, keberhasilan penerimaan PBB akan tercapai jika wajib pajak memiliki tingkat religiusitas yang lebih tinggi sehingga tingkat kepatuhan membayar pajak pun juga tinggi.
- b. Keberhasilan penerimaan PBB tidak disebabkan oleh persepsi tentang pelaksanaan sanksi denda yang dimiliki wajib pajak. Variabel persepsi wajib pajak pada tabel di atas memiliki nilai Sig. sebesar  $0,593 > 0,05$ . Sedangkan t hitung diperoleh angka sebesar -0,537. Dalam hal ini  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (1,985), maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, sehingga persepsi wajib pajak tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Artinya persepsi tentang pelaksanaan sanksi denda bukan termasuk unsur yang dapat berpengaruh pada keberhasilan penerimaan PBB.
- c. Keberhasilan penerimaan PBB secara signifikan dipengaruhi oleh variabel tingkat penghasilan. Variabel tingkat penghasilan dalam tabel diatas memiliki nilai Sig. sebesar  $0,026 < 0,05$ . Sedangkan t hitung didapat angka senilai 2,266. Dalam hal ini  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (1,985), maka H3 diterima dan tingkat pendapatan mempunyai dampak positif signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Banyaknya penghasilan yang diterima wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, sehingga dalam hal ini keberhasilan penerimaan PBB dapat tercapai.
- d. Keberhasilan penerimaan PBB secara signifikan dipengaruhi oleh variabel pemutihan pajak. Dalam tabel diatas variabel pemutihan pajak menunjukkan nilai Sig. sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan t hitung diperoleh angka senilai 4,253. Dalam hal ini  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (1,985), maka hal ini menunjukkan bahwa pernyataan H4 diterima. Pemutihan pajak berpengaruh positif signifikan bagi keberhasilan

penerimaan PBB. Tingginya pemanfaatan pemutihan pajak oleh wajib pajak, maka dapat meningkatkan penerimaan PBB.

#### 4.6.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang digunakan dalam model regresi ini, dilakukan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

**Tabel 4.13**  
**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,617 <sup>a</sup>	,380	,354	1,79239

*Sumber : diolah dengan SPSS 21*

Berdasarkan pada tabel di atas, nilai Adjusted R Square (koefisien determinasi) 0,354 atau sebesar 35,4%. Dalam hal ini berarti keberhasilan penerimaan PBB dipengaruhi sebesar 35,4% oleh religiusitas, persepsi tentang pelaksanaan sanksi denda, tingkat penghasilan, dan pemutihan pajak. Sedangkan sisanya sebesar 64,6% tidak menjadi bagian dari penelitian ini karena terpengaruh oleh faktor lain yang belum teridentifikasi.

#### 4.6.4 Uji Simultan (Uji F)

Uji F berguna saat menentukan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara simultan atau bersamaan. Signifikansi pengaruh variabel independen Religiusitas, Persepsi Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda, Tingkat Penghasilan, dan Pemutihan Pajak terhadap variabel dependen Keberhasilan Penerimaan PBB dievaluasi dengan menggunakan uji F. Ambang batas signifikansi dalam pengujian ini adalah 5% atau 0,05 yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Hipotesis diterima atau variabel bebas terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, jika nilai sig. kurang dari 0,05. Sedangkan hipotesis ditolak atau variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat jika tingkat sig. melebihi 0,05. Berikut ini disajikan hasil uji F melalui output tabel anova sebagai berikut:

**Tabel 4.14**  
**Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	187,305	4	46,826	14,575	,000 <sup>b</sup>
	Residual	305,205	95	3,213		
	Total	492,510	99			

*Sumber : diolah SPSS 21 (data primer)*

Berdasarkan pada tabel diperoleh F hitung yang nilainya 14,575 dengan nilai Sig. sebesar  $0,000 < 0,05$ . Menurut dasar pengambilan keputusan jika nilai sig  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dan variabel-variabel independen secara simultan mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa model penelitian ini sudah fit.

#### 4.7 Pembahasan Penelitian

##### 4.7.1 Pengaruh Religiusitas terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB

Dilihat dari hipotesis pertama, religiusitas dikatakan mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB suatu negara. Pengujian hipotesis telah melalui serangkaian uji regresi dimulai dari uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda. Berdasarkan analisis data penelitian diketahui bahwa  $t_{hitung}$  variabel religiusitas bernilai 2,679 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,985. Dari hasil tersebut nilai  $t_{hitung}$  (2,679)  $>$   $t_{tabel}$  (1,985), sehingga religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Dengan demikian H1 diterima dengan nilai signifikansi sebesar  $0,009 < 0,05$ .

Riset ini mendukung penelitian Indah Sukendriati (2022), Yuni Andiani (2022), Rosi Iswara (2019) yang mengklarifikasi bahwa kepatuhan wajib pajak membayar PBB dipengaruhi oleh religiusitas. Telah terbukti bahwa wajib pajak yang religiusitasnya tinggi akan lebih patuh untuk melakukan pembayaran pajak daripada wajib pajak yang religiusitasnya rendah. Dapat dikatakan bahwa tingkat religiusitas wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan yang akan meningkatkan penerimaan PBB. Wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi paham bahwa kewajiban membayar pajak ada didalam Al-Qur'an, sehingga mereka akan berusaha mematuhi kewajiban yang seharusnya dikerjakan. Pajak merupakan suatu keharusan yang wajib ditepati karena agama mewajibkan umatnya untuk memiliki sifat jujur.

Hasil ini juga sejalan dengan teori atribusi, bahwa baik aspek internal maupun eksternal mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak. Menurut elemen teori atribusi,

faktor internal mencakup hal-hal seperti sifat, karakter, dan sikap, sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu. Religiusitas termasuk faktor internal yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Gunungpati. Faktor utama yang menentukan jujur atau tidaknya seseorang dalam urusan perpajakan adalah tingkat religiusitasnya. Semakin tinggi ketaatan yang dimiliki seseorang untuk membayar pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak.

#### **4.7.2 Pengaruh Persepsi Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB**

Berdasarkan hipotesis persepsi wajib pajak tentang sanksi denda dinilai memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Berdasarkan hasil hipotesis yang sudah diolah tersebut, besarnya  $t_{hitung}$  variabel persepsi tentang pelaksanaan sanksi denda adalah -537 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,985. Dalam hal ini nilai  $t_{hitung} (-537) < t_{tabel} (1,985)$ , maka keberhasilan penerimaan PBB tidak dipengaruhi oleh faktor persepsi wajib pajak. Dengan demikian H2 ditolak dengan alasan tingkat signifikansi sebesar  $0,593 > 0,05$ . Hasil ini tidak memenuhi syarat yang semestinya nilai  $sig < 0,05$  dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .

Hasil ini mendukung penelitian dari Indah Wulandari Wilujeng dan Imahda Khoiri Furqon (2021), Ibnu Muttaqin dan Eva Anggra (2018), dan Sobrotul Imtikhanah dan Nin Sulistyowati (2010), yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak mengenai denda PBB bukan merupakan faktor yang terbukti dalam keberhasilan penerimaan PBB. Berdasarkan data yang didapat dari penyebaran kuesioner, kebanyakan responden menjawab bahwa mereka tidak keberatan dengan adanya sanksi denda PBB dan menganggap bahwa pajak bukan suatu hal yang memberatkan. Akan tetapi sikap wajib pajak terhadap sanksi denda di Kecamatan Gunungpati cenderung mengabaikan dan menunda untuk membayar pajak karena kurang peduli dengan sanksi denda yang diberikan. Mereka cenderung akan membayar pajak ketika sudah mendapatkan peringatan ataupun didatangi langsung kerumah oleh petugas. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Gunungpati terhadap pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pernyataan H2 ini tidak konsisten dengan hasil pengujian dari Tomy Yulian Arrizky (2018), Rizka Wahyuni Siregar (2015), Didik Darmawan (2010) bahwa tingginya penerimaan PBB dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap penerapan sanksi denda. Dari penelitian terdahulu memberikan anggapan bahwa wajib pajak yang tahu akan pengenaan denda PBB cenderung akan membayar pajaknya tepat waktu.

Pemahaman yang dimiliki tentang aturan pajak merupakan proses wajib pajak mengetahui serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk menunaikan pajak, sehingga terjadi peningkatan penerimaan pajak.

Keberhasilan Penerimaan PBB diartikan sejauh mana wajib pajak patuh pada aturan perpajakan. Teori atribusi mendukung hasil ini bahwa adanya aspek internal atau eksternal mempengaruhi berhasil atau tidaknya penerimaan PBB. Menurut gagasan atribusi, pandangan wajib pajak tentang adanya sanksi merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam bertindak. Akan tetapi, dalam penelitian ini keberhasilan penerimaan PBB di Gunungpati tidak dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda. Ada beberapa responden yang menjawab jika dengan adanya sanksi pajak sebesar 2% per bulan dianggap sangat memberatkan. Terlebih jika penghasilan yang didapatkan tidak menentu. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakannya untuk keperluan lain dibandingkan untuk membayar pajak sekalipun jumlah pajak yang terhutang sedikit.

#### **4.7.3 Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Berdasarkan analisis hipotesis yang sudah diolah tersebut, diketahui  $t_{hitung}$  variabel tingkat penghasilan bernilai 2,266 dan  $t_{tabel}$  bernilai 1,985. Ketika hasil  $t_{hitung}$  (2,266) melebihi nilai  $t_{tabel}$  (1,985), maka keberhasilan penerimaan PBB dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat penghasilan. Dengan demikian H3 diterima dengan taraf sig. sebesar  $0,026 < 0,05$  berdasar syarat nilai sig  $< 0,05$  dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .

Hasil ini sejalan dengan penelitian Bobby Wirawan Aji (2014), Angga Munggara Harisman (2009), Martika Cahyani dkk (2018), yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Tingkat penghasilan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Individu dengan penghasilan yang cukup mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar PBB akan semakin tinggi. Temuan penelitian ini juga menguatkan pernyataan Ayu Wiji Anggraeni bahwa tidak akan terjadi kesukaran dalam masyarakat saat membayar pajak bila besarnya pajak terhutang masih dibawah dari penghasilan yang sebenarnya mereka dapatkan setiap bulan. Namun, wajib pajak yang berpenghasilan rendah cenderung akan

mendahulukan kebutuhannya sebelum membayar pajak. Dalam hal ini jika menunda menunaikan pajak maka berdampak pada penurunan tingkat penerimaan pajak.

Penelitian ini mendukung gagasan atribusi bahwa aspek internal maupun eksternal dapat mendorong seseorang untuk berperilaku. Menurut teori atribusi, tingkat penghasilan termasuk aspek eksternal yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Ketika tingkat patuh dalam membayar pajak semakin besar maka penerimaan PBB juga akan meningkat. Dengan adanya pemungutan pajak seharusnya akan lebih meningkatkan motivasi wajib pajak untuk lebih giat bekerja. Penghasilan wajib pajak yang tinggi akan mempengaruhi keputusan untuk menunaikan pajak tepat waktu, sehingga keberhasilan penerimaan pajak dapat tercapai.

#### **4.7.4 Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB**

Hipotesis keempat menyatakan bahwa pemutihan pajak dapat mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB. Berdasarkan hasil hipotesis yang sudah diolah tersebut, diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel pemutihan pajak adalah 4,253 dan  $t_{tabel}$  bernilai 1,985. Dalam hal ini  $t_{hitung}$  (4,253) >  $t_{tabel}$  (1,985), maka pemutihan pajak memberi dampak signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Dengan demikian H4 terbukti diterima dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang memenuhi syarat nilai sig < 0,05 dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .

Hasil ini mendukung penelitian Martalita Arti Hidayah dan Bambang Suryono (2022), Idzni Widiyanti Agustini dkk (2021) yang menunjukkan jika pemutihan pajak berdampak positif pada ketaatan membayar pajak PBB. Artinya dengan adanya pemutihan pajak dapat memberikan pikiran yang baik bagi wajib pajak yang semula tidak patuh, namun ketika memanfaatkan program ini wajib pajak dapat melunasi hutangnya hanya dengan membayar pokok piutangnya tanpa dikenakan denda administratif. Penelitian lainnya dari Asianto Nugroho (2022) menunjukkan bahwa pemutihan pajak ada pengaruhnya pada optimalisasi target PBB. Menurutnya, untuk meningkatkan motivasi kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk lebih cepat membayar pajak dapat melalui program pemutihan dan pemberian hadiah. Hasil serupa terlihat dalam penelitian ini, yang menunjukkan bahwa pemutihan pajak mempunyai dampak signifikan dengan keberhasilan penerimaan PBB. Bukti ini mendukung klaim Djolie (2019) bahwa penghapusan atau pembebasan denda PBB menjadi alasan kenaikan penerimaan pajak. Jadi semakin tinggi pemanfaatan program pemutihan pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan PBB yang diterima.

Ketika meninjau langsung ke pos pelayanan pembayaran PBB di Kecamatan Gunungpati, sebagian besar masyarakat telah mengetahui dan paham tentang adanya program pemutihan pajak atau penghapusan sanksi denda PBB. Program pemutihan pajak sebelumnya juga telah disosialisasikan melalui media sosial Bapenda Kota Semarang ataupun platform-platform lainnya untuk menginformasikan program tersebut kepada masyarakat. Adanya pemutihan pajak, maka wajib pajak Gunungpati yang masih menunggak merasa lebih teringankan dalam membayar hutang pajaknya. Artinya upaya pemerintah melalui program pemutihan pajak sangat solutif untuk menaikkan motivasi kesadaran dan ketaatan masyarakat agar segera membayar pajak.

Riset ini mendukung gagasan atribusi yang menyatakan bahwa aspek internal atau eksternal memberikan pengaruh pada tingkah laku seseorang. Berdasarkan teori atribusi, pemutihan pajak termasuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB. Penerimaan pajak akan meningkat apabila ketaatan seorang wajib pajak tersebut baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, Persepsi Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda, Tingkat Penghasilan, Dan Pemutihan Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB di Kecamatan Gunungpati” diperoleh kesimpulannya sebagai berikut:

1. Variabel religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Hal ini dibuktikan dari nilai  $t_{hitung}$  adalah 2,679 dengan besarnya nilai signifikansi  $0,009 < 0,05$ . Dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas wajib pajak maka akan meningkatkan ketaatan wajib pajak sehingga keberhasilan penerimaan pajak dapat tercapai.
2. Variabel persepsi tentang pelaksanaan sanksi denda tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Pengolahan data yang telah dijalankan memperoleh hasil bahwa besarnya nilai  $t_{hitung}$  yang didapat adalah -0,537 dengan nilai signifikansi  $0,593 > 0,05$ . Hal ini menerangkan bahwa sebaik-baiknya persepsi yang dimiliki wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda bukan termasuk faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Gunungpati.
3. Variabel tingkat penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilaksanakan memperoleh nilai  $t_{hitung}$  dengan besar 2,266 dan nilai signifikansi  $0,026 < 0,05$ . Hasil ini menandakan bahwa semakin tinggi penghasilan yang diterima wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, sehingga dalam hal ini keberhasilan penerimaan PBB dapat tercapai.
4. Variabel pemutihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Hal ini dibuktikan dari nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,253 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Jadi semakin tinggi pemanfaatan program pemutihan pajak, maka penerimaan PBB juga akan meningkat. Dalam hal ini berarti dengan program pemutihan pajak dapat membantu meringankan beban wajib pajak sehingga keberhasilan penerimaan PBB dapat tercapai.

## 5.2 Saran

Sesuai dengan proses penelitian yang sudah selesai dilaksanakan, peneliti ingin memberikan saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya:

1. Untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, dapat diperluas dengan penambahan variabel lain seperti, digitalisasi pembayaran, relaksasi PBB, dan variabel lain diluar penelitian ini.
2. Sampel yang digunakan masih sedikit dari jumlah populasi aslinya. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya bisa menambah jumlah sampel dan memperluas cakupan selain di Kecamatan Gunungpati untuk hasil penelitian yang lebih relevan.
3. Pengujian dalam skripsi ini masih menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan *software* dengan versi yang lebih baru.
4. Bagi organisasi yang berkaitan dengan pajak, pentingnya undang-undang perpajakan ditunjukkan dengan mengenakan sanksi yang tegas kepada pembayar pajak yang memiliki tunggakan. Wajib pajak diharuskan untuk taat dengan undang-undang yang berlaku untuk menghindari membayar denda yang besar. Diharapkan dengan pemberlakuan sanksi pajak yang tegas dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak.
5. Melalui kebijakan pembebasan sanksi denda diyakini dapat meningkatkan motivasi kesadaran dan kepatuhan masyarakat, maka diharapkan pemerintah dapat menerapkan program sejenis atau upaya lainnya agar masyarakat lebih cepat membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Idzni Widiyanti, Yeti Apriliawati, and Arry Irawan, 'Pengaruh Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kota Bandung', *Indonesian Accounting Research Journal*, 1.2 (2021), 271–79
- Aji, Boby Wirawan, 'Pengaruh Faktor Perilaku Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz 1*, ed. by Anwar Rasyidi, K. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, and Bahrin Abubakar, 2nd edn (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992)
- Anggraeni, Ayu Wiji, Mochammad Al Musadieg, and Achmad Husaini, 'Peranan Faktor Internal Dan Eksternal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dari Pertambangan Batu Kapur Di Kabupaten Tuban', *Jurnal Perpajakan*, 10.1 (2019), 1–10 <perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>
- ANWAR, DEKY, ILHAM MARNOLA, and SURYANI SURYANI, 'Pengaruh Religiusitas Dan Komunitas Terhadap Motivasi Berwirausaha Para Pemuda', *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 4.2 (2019), 181 <<https://doi.org/10.15548/jebi.v4i2.244>>
- Arrizky, Tomy Yulian, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Tapin', *KINDAI*, 14.2 (2018), 170–83
- Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, 'Pajak Dalam Islam', *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3 (2015), 106
- Basyaroh, Elisha Martha Hanum, 'Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Sanksi Perpajakan, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)
- Cahayani, Martika, 'Pengaruh Penerimaan SPPT, Moralitas Pajak, Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Badung', *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 9.1 (2018), 133–44
- Darmakanti, Ni Made, and Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, 'Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi', *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2.2 (2021), 88–

94 <<https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>>

- Darmawan, Didik, 'Analisis Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang', *Library.Uns.Ac.Id*, 2010
- Darwin, MBP, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 1st edn (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010)
- Diana, Tria Mei, *STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI KONSTRUKSI EKONOMI 4.0 DI TINJAU MELALUI ANALISIS SWOT (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung), Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 2015, III
- Fauziyah, Laily, 'PENGARUH KARAKTERISTIK PADA WAJIB PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PBB (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan Satu)' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)
- Ferdiansyah, Reza, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Pemerintah (Studi Empiris Pada Bpkp Perwakilan Provinsi Dki Jakarta)', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16.2 (2016), 109 <<https://doi.org/10.20961/jab.v16i2.200>>
- Fiskus, Kualitas Pelayanan, Sistem Transparansi, Kesadaran Wajib Pajak, D A N Sanksi, Aglista Ramadhanty, Departemen Akuntansi, and others, '29037-61852-1-Sm', 9 (2020), 1–15
- Harisman, Angga Munggara, 'Analisis Pengaruh Faktor Faktor Yang Melekat Pada Tax Payer (Wajib Pajak) Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009)
- Hidayah, Martalita Arti, and Bambang Suryono, 'Pengaruh Sppt, Sanksi Perpajakan, Dan Pemutihan Pbb Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb', 11.11 (2022)
- Huda, Choirul, 'ETOS KERJA PENGUSAHA MUSLIM (Studi Kasus Pada Pengusaha Muslim Alumni UIN Walisongo Semarang)', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.2 (2016), 79–107 <<https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.2.1156>>
- Iswara, Rosi, 'Pengaruh Pendapatan Dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kedungkelor', *Eprints.Walisongo.Ac.Id* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)
- Kahpi, Ashabul, 'Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak', *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 20.1 (2020), 43 <<https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i1.14190>>
- Kelley, Harold H., and John L. Michela, 'Attribution Theory and Research', *Annual Review of Psychology*, 31.1 (1980), 457–501

- <<https://doi.org/10.1146/annurev.ps.31.020180.002325>>
- Kholiludin, Tedi, *Menjaga Tradisi Di Garis Tepi: Identitas, Pertahanan Dan Perlawanan Kultural Masyarakat Etno-Religius*, ed. by Khoirul Anwar (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), 2018)
- Mardiasmo, *Perpajakan*, ed. by Maya, 2018th edn (Yogyakarta: Andi, 2018)
- Martias, Lilih Deva, 'Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi', *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16.1 (2021), 40  
<<https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>>
- Maulana, Ag., and Nur Sakinah, 'Konsep Toleransi Terhadap Orang Yang Berhutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah 280', *Kutubkhanah*, 20.2 (2021), 162  
<<https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v20i2.13350>>
- McDaniel, S. W., and J. J. Burnett, 'Consumer Religiosity and Retail Store Evaluative Criteria', *Journal of the Academy of Marketing Science*, 18.2 (1990)
- Murtadho, Ali, 'Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2013), 33–50 <<https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759>>
- Muttaqin, Ibnu, 'Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, SPPT, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten', *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10.2 (2018), 218–31 <<https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.83>>
- Nugroho, Asianto, 'Model Tax Feedback Dalam Pemenuhan Optimalisasi Target Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kota Surakarta', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9.1 (2022), 469–80
- Pandiangan, Liberti, *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*, ed. by Suryadi Saat, 2014th edn (Ciracas, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014)  
<<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19812>>
- Pasaribu, Ehud Mangaratua, and Satria Yudhia Wijaya, 'Implementasi Teori Atribusi Untuk Menilai Perilaku Kecurangan Akuntansi', *Ekonomi Dan Bisnis*, 4.1 (2017), 41–66  
<<https://doi.org/10.35590/jeb.v4i1.735>>
- Praja, Qohar Triyoga, Anwar Made, and Sulistiyo, 'Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4.1 (2016), 1–12 <<http://ejurnal.unikama.ac.id>>
- Romadhon, Fitri, and Erlina Diamastuti, 'Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory', *Jurnal Ilmiah Esai*, 14.1 (2020), 17–35

<<https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI>>

- Setyorini, Dini, Ety Nurhayaty, and Rosmita Rosmita, 'PENGARUH TRANSAKSI ONLINE (e-Commerce) TERHADAP PENINGKATAN LABA UMKM (Studi Kasus UMKM Pengolahan Besi Ciampea Bogor Jawa Barat)', *Jurnal Mitra Manajemen*, 3.5 (2019), 501–9 <<https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i5.228>>
- Siregar, Rizka Wahyuni, 'Pengaruh Sikap Wajib Pajak Mengenai Fungsi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Sppt Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pbb Kota Pekanbaru', *JOMFekom*, 4.1 (2015), 843–57 <<https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>>
- Sitepu, Mena Meri Selly, 'Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada UPT VI Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan' (Universitas Medan Area, 2017)
- Sugiyono, Prof. Dr., *Metode Penelitian Kebijakan*, ed. by Safitri Yosita Ratri, 1st edn (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017)
- Sukendriati, Indah, 'Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, SPPT, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pejagoan' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)
- Tjandra Tirtono, Triani, Nurdhiana, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tngkat Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal STIE Semarang*, 14.3 (2022), 130–51
- Utari, Putri Dwi, 'Pengaruh Kesadaran, Tax Amnesty Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Bidang Pendidikan', 2017
- Wiguna, Yoga Haqim, 'Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi' (Universitas Islam Indonesia, 2018)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *Lampiran 1 Kuesioner Penelitian*

#### **BIODATA/IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama :
2. Usia :  25-39  
 40-59  
 >60
3. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan
4. Pendidikan terakhir :  SD dan Sederajat  D1-D3  
 SMP dan Sederajat  
 SMA dan Sederajat  S1-S3
5. Pekerjaan :  Petani  Karyawan Swasta  
 PNS  Lainnya  
 Buruh

#### Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/ibu/saudara/i cukup memberikan tanda check list ( $\surd$ ) pada alternatif jawaban yang tersedia sesuai pendapat Bapak/ibu/saudara/i. Setiap pertanyaan mengharapkan ada satu jawaban. Skala yang digunakan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

Angka 1 = STS (sangat tidak setuju)

Angka 2 = TS (tidak setuju)

Angka 3 = R (ragu-ragu)

Angka 4 = S (setuju)

Angka 5 = SS (sangat setuju)

<b>RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK (X1)</b>						
<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1.	Saya meyakini seseorang yang taat pada perintah agama akan menaati perintah Negara termasuk membayar pajak.					
2.	Saya yakin bahwa membayar pajak merupakan suatu bentuk amal kebaikan.					
3.	Saya mengimplementasikan ajaran agama dengan membayarkan hutang pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah.					
4.	Saya selalu taat dan tidak pernah melakukan kecurangan yang berkaitan dengan pajak.					
5.	Saya merasa lebih tenang ketika membayar pajak tepat waktu.					
6.	Saya membayar pajak sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT.					
7.	Agama mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara adalah membayar pajak.					
8.	Pemahaman saya tentang agama mempengaruhi keputusan saya dalam membayarkan PBB.					
9.	Saya mempertimbangkan pahala dan dosa ketika hendak melakukan perbuatan curang dalam membayar pajak.					
10.	Saya merasa berdosa apabila melakukan kecurangan yang berkaitan dengan pajak.					

<b>PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PELAKSANAAN SANKSI DENDA (X2)</b>						
<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1.	Denda bunga sebesar 2% perbulan jika terlambat membayar pajak adalah wajar.					
2.	Pembayaran pajak sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo, jika sudah lewat akan terkena denda.					
3.	Saya membayar PBB tepat waktu supaya tidak didenda.					
4.	Pajak tidak memberatkan saya.					

<b>TINGKAT PENGHASILAN (X3)</b>						
<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1.	Penghasilan yang saya terima lebih dari Rp. 3.000.000,00 per bulannya.					
2.	Besar kecilnya pendapatan saya tidak menjadi penghalang untuk membayar pajak.					
3.	Penghasilan yang saya dapatkan sudah sesuai dengan jenis pekerjaan.					
4.	Saya mempunyai pekerjaan sampingan untuk memperoleh tambahan pendapatan.					
5.	Penghasilan yang diterima sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga.					
6.	Memiliki tanggungan anggota keluarga selain suami, istri, dan anak.					

<b>PEMUTIHAN PAJAK (X4)</b>						
<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1.	Dengan adanya program pemutihan pajak memberikan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.					
2.	Saya memanfaatkan program pemutihan pajak untuk melunasi semua hutang pajak.					
3.	Saya membayar pajak PBB tepat waktu sebagai bentuk pengabdian saya kepada negara.					
4.	Saya membayar pajak PBB sebagai bentuk partisipasi saya dalam menunjang pembangunan daerah.					

<b>PENERIMAAN PAJAK (Y)</b>						
<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1.	Saya selalu membayar pajak PBB dengan tepat waktu, sehingga penerimaan PBB meningkat.					
2.	Jika saya tidak membayar pajak, maka penerimaan pajak akan terhambat.					
3.	Manfaat pembayaran pajak salah satunya adalah penyediaan sarana dan layanan gratis yang disediakan pemerintah.					
4.	Penerimaan yang meningkat akan menghasilkan pembangunan yang semakin baik.					

Lampiran 2 Tabulasi Data

a. Variabel Religiusitas (X1)

X1 RELIGIUSITAS										
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	Total X1
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	44
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
4	3	4	5	5	3	3	3	4	2	36
5	4	5	5	5	4	4	3	4	5	44
4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	46
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
3	4	4	2	3	3	2	4	2	3	30
4	4	4	4	1	4	1	4	1	1	28
4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	42
3	3	4	4	4	3	3	2	4	4	34
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
4	4	3	3	5	4	4	2	3	4	36
4	3	3	4	3	3	3	3	5	5	36
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	4	4	5	5	2	5	4	41
5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	48
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	43
4	3	4	3	3	4	4	4	2	3	34
4	4	5	4	5	5	4	3	5	5	44
5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	47
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	44
4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	43
4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	33
3	4	4	5	5	4	3	4	4	2	38
3	4	4	5	5	4	5	3	4	4	41
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
4	3	4	4	5	3	4	3	5	4	39
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	4	4	5	4	4	4	4	3	41
2	4	4	4	3	2	4	2	3	3	31
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
3	4	4	4	4	3	3	4	4	5	38

4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
5	5	5	4	4	5	5	5	3	4	45
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	46
4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	37
3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	38
4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	41
3	4	4	4	5	4	4	3	4	4	39
5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	47
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
3	2	3	4	5	2	3	1	2	3	28
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	3	4	5	5	4	5	4	4	5	42
4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	46
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	5	3	5	5	5	4	4	3	4	42
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	5	4	4	5	4	5	3	5	5	44
4	4	3	3	5	4	2	3	4	4	36
4	4	4	3	5	3	4	4	4	4	39
4	5	3	3	3	5	3	4	4	4	38
4	4	4	2	4	4	2	3	4	2	33
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	37
4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	42
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	38
4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	42
4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	37
4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	38
4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	45
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
2	4	4	4	5	5	4	4	3	4	39
4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	38
4	4	3	4	4	4	5	3	2	4	37
5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	46
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	4	5	4	4	5	3	5	5	44
1	4	4	4	5	2	4	1	4	4	33
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	46

5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	47
5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48
3	3	3	4	3	2	2	3	4	3	30
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	4	3	4	4	4	1	3	3	3	32
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	42
5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	42
5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	45
4	4	3	4	5	4	4	3	4	5	40
4	4	4	5	4	5	5	4	3	4	42
4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	43
4	5	4	5	5	5	4	3	4	5	44
4	4	4	4	5	3	4	3	4	5	40
5	5	5	5	4	5	5	4	3	4	45

**b. Variabel Persepsi Wajib Pajak (X2)**

X2 PERSEPSI WP				
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total X2
4	4	4	4	16
4	3	4	4	15
3	4	4	3	14
4	4	5	2	15
3	5	4	4	16
2	3	4	5	14
3	3	4	4	14
4	4	4	4	16
2	2	3	4	11
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12
4	5	4	5	18
2	4	3	4	13
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	5	4	5	18
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
3	4	2	4	13
3	4	4	3	14
2	5	5	4	16

3	4	4	4	15
3	4	4	4	15
3	4	4	4	15
4	5	5	4	18
3	3	3	3	12
2	3	4	4	13
4	5	5	3	17
3	4	3	3	13
1	4	5	3	13
3	5	5	3	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	5	3	16
4	5	5	4	18
3	4	5	4	16
1	4	1	3	9
1	3	5	3	12
4	5	5	4	18
4	4	4	3	15
1	1	5	4	11
3	4	4	3	14
3	4	4	3	14
4	5	4	4	17
4	5	5	3	17
3	5	5	3	16
3	5	5	5	18
4	5	4	4	17
1	2	5	1	9
4	4	4	4	16
4	5	5	3	17
2	4	4	4	14
3	4	4	4	15
4	5	4	4	17
4	4	4	4	16
4	4	4	3	15
4	3	4	4	15
4	4	4	3	15
4	3	4	4	15
4	4	4	2	14
4	4	4	4	16
3	4	4	4	15
4	4	4	3	15
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
2	4	4	3	13

2	4	4	4	14
4	4	4	3	15
5	3	2	5	15
2	2	4	4	12
2	2	4	4	12
1	4	4	3	12
4	4	4	4	16
3	4	4	3	14
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
2	5	5	4	16
4	4	4	4	16
3	4	4	3	14
3	3	3	3	12
5	5	4	4	18
4	5	5	4	18
4	5	5	5	19
4	4	4	4	16
1	4	4	2	11
4	4	4	4	16
1	3	2	1	7
4	4	4	4	16
3	2	4	2	11
3	2	4	3	12
1	2	4	3	10
4	4	4	4	16
4	5	5	4	18
3	4	4	4	15
5	5	5	3	18
4	5	5	3	17
2	3	3	3	11
2	4	5	2	13
4	5	4	5	18

**c. Variabel Tingkat Penghasilan (X3)**

X3 TINGKAT PENGHASILAN						
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total X3
3	3	4	3	4	4	21
1	4	2	1	2	1	11
3	3	4	4	4	2	20
3	3	3	2	3	3	17
5	5	5	4	5	5	29
4	4	4	3	4	4	23

4	5	4	5	4	4	26
3	3	3	2	4	2	17
1	4	4	1	4	2	16
2	4	4	4	4	2	20
2	3	4	3	3	4	19
1	3	4	1	2	1	12
4	5	4	2	4	2	21
3	4	3	4	3	1	18
2	3	4	2	3	3	17
4	5	4	4	4	3	24
4	3	4	5	5	5	26
5	5	5	4	4	4	27
4	3	4	4	4	2	21
4	4	4	3	4	4	23
4	4	4	2	4	4	22
2	4	5	2	5	2	20
4	3	3	3	3	1	17
4	4	3	4	4	4	23
5	5	5	4	5	3	27
1	3	3	1	3	1	12
2	3	4	2	4	3	18
2	2	4	4	3	3	18
5	4	5	1	4	3	22
3	4	4	4	4	2	21
5	1	3	5	4	4	22
2	3	3	2	3	3	16
3	4	4	3	4	1	19
4	4	4	4	4	4	24
2	3	3	2	3	3	16
3	4	4	4	5	2	22
4	4	4	3	4	1	20
5	4	4	4	3	3	23
4	3	4	4	4	1	20
1	4	3	2	1	1	12
4	4	4	2	4	2	20
5	4	5	5	5	2	26
2	3	3	3	3	3	17
2	4	3	3	2	2	16
2	3	4	5	3	2	19
3	4	4	2	4	2	19
1	3	3	3	3	5	18
3	5	5	3	3	5	24
1	5	5	5	5	5	26
2	3	4	1	4	1	15
3	4	4	4	4	4	23

4	4	3	2	4	1	18
1	5	4	2	4	2	18
3	4	4	3	4	4	22
4	4	4	2	4	5	23
2	3	2	2	2	2	13
2	4	4	3	5	3	21
4	4	4	5	5	4	26
2	4	4	4	4	4	22
5	4	4	5	5	4	27
3	4	2	2	2	4	17
2	4	4	4	2	2	18
4	4	3	2	4	4	21
2	4	1	2	2	4	15
2	4	4	4	3	2	19
1	4	2	2	5	4	18
2	4	4	4	3	4	21
2	4	3	2	3	2	16
1	4	2	2	5	4	18
2	4	2	2	2	2	14
2	4	4	2	4	2	18
4	2	4	2	5	2	19
1	3	3	3	3	1	14
4	4	3	4	4	4	23
1	4	4	2	2	4	17
4	3	4	4	4	4	23
3	4	4	2	4	2	19
2	4	4	4	4	3	21
2	4	4	2	4	2	18
4	2	4	4	4	4	22
5	4	4	1	4	5	23
5	5	4	2	5	4	25
4	4	4	4	4	2	22
4	4	4	4	4	2	22
5	5	5	3	4	3	25
4	3	4	2	4	2	19
2	4	3	2	3	4	18
4	2	4	1	4	3	18
4	4	4	4	4	4	24
4	4	3	2	4	4	21
4	4	3	2	4	4	21
4	3	4	2	4	4	21
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	4	4	3	20
4	4	4	2	4	2	20
4	4	5	5	5	2	25

5	3	3	3	4	2	20
3	3	3	2	4	2	17
3	3	4	4	1	5	20
3	4	4	5	4	2	22

**d. Variabel Pemutihan Pajak (X4)**

X4 PEMUTIHAN PAJAK				
X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	Total X4
4	3	3	4	14
5	2	3	3	13
4	4	4	4	16
3	3	3	4	13
5	3	5	5	18
4	4	4	4	16
5	2	5	5	17
4	2	3	4	13
5	4	4	5	18
5	4	4	4	17
4	4	4	3	15
4	3	4	4	15
4	3	4	4	15
3	3	2	4	12
3	3	3	3	12
5	4	4	5	18
5	5	3	5	18
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
5	3	5	5	18
5	4	4	4	17
4	1	5	5	15
4	4	3	4	15
4	4	3	4	15
4	4	5	5	18
4	4	4	4	16
5	4	4	4	17
3	4	4	4	15
5	3	4	4	16
4	3	4	3	14
4	4	5	5	18
4	4	4	3	15
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
3	3	4	4	14

3	3	4	4	14
3	3	3	4	13
5	4	4	4	17
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
5	4	5	5	19
3	3	4	4	14
3	3	4	4	14
5	5	4	4	18
3	4	4	4	15
4	4	4	4	16
4	4	5	5	18
4	4	4	4	16
4	4	3	4	15
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	3	4	4	15
3	3	4	4	14
5	3	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
3	5	5	5	18
5	4	4	4	17
3	5	5	5	18
4	4	4	3	15
4	4	4	4	16
5	4	4	3	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	3	4	4	15
4	4	4	4	16
5	5	3	5	18
4	4	4	4	16
3	3	4	4	14
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	5	4	4	18
4	3	4	4	15
4	4	4	4	16
5	5	5	4	19
4	4	4	4	16
5	4	5	5	19

5	4	4	4	17
5	3	5	4	17
4	4	5	5	18
4	4	5	5	18
5	5	5	5	20
4	3	4	4	15
4	4	4	4	16
3	3	2	2	10
4	4	4	4	16
2	4	4	2	12
4	4	4	4	16
2	4	4	3	13
4	4	4	5	17
4	4	5	5	18
4	4	5	5	18
4	4	4	4	16
5	4	4	4	17
2	3	3	3	11
5	3	3	4	15
4	4	4	5	17

**e. Variabel Keberhasilan Penerimaan Pajak (Y)**

Y PENERIMAAN PAJAK				
Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Total Y
2	2	4	4	12
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	4	4	4	17
5	4	5	5	19
4	4	4	4	16
4	5	5	5	19
2	3	3	2	10
5	4	4	5	18
3	4	3	4	14
4	4	4	3	15
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	3	4	4	15
3	4	3	3	13
5	2	5	5	17
4	4	3	4	15
5	5	5	5	20
4	3	3	4	14

4	3	4	5	16
4	4	4	2	14
5	5	4	5	19
3	3	4	4	14
4	4	3	4	15
5	4	4	5	18
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	2	2	2	10
4	4	5	4	17
3	3	3	3	12
5	5	5	5	20
4	3	3	3	13
4	4	3	4	15
4	4	4	4	16
4	5	4	4	17
4	3	4	4	15
3	3	4	4	14
4	4	4	4	16
5	2	5	5	17
1	4	5	5	15
4	3	4	4	15
5	5	5	5	20
3	3	3	3	12
4	3	3	4	14
3	4	4	3	14
3	4	2	3	12
4	3	4	5	16
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
3	3	4	5	15
4	4	4	4	16
4	4	4	3	15
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	5	4	5	19
4	4	4	4	16
4	4	5	4	17
4	4	5	4	17
4	4	4	4	16
5	4	4	4	17
4	4	2	4	14
4	4	4	4	16
3	4	4	4	15
4	4	4	5	17

4	4	4	4	16
3	3	4	4	14
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
3	3	4	4	14
3	4	4	4	15
4	4	4	4	16
4	2	3	4	13
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
4	3	2	3	12
4	2	4	3	13
4	4	4	4	16
4	4	4	3	15
4	4	4	4	16
5	2	5	5	17
4	4	5	5	18
5	4	5	3	17
4	4	5	5	18
5	4	5	5	19
5	5	5	5	20
3	3	4	4	14
4	4	4	4	16
3	2	3	3	11
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
4	3	4	4	15
4	4	3	4	15
4	4	3	4	15
2	4	3	3	12
3	4	4	4	15
4	4	5	5	18
5	3	4	5	17

Lampiran 3 Hasil Output SPSS\_Uji Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X1	100	22,00	28,00	50,00	40,9900	5,07618	25,768
X2	100	13,00	7,00	20,00	14,9100	2,35314	5,537
X3	100	18,00	11,00	29,00	20,1300	3,69180	13,629
X4	100	10,00	10,00	20,00	16,0000	1,93845	3,758
Y	100	10,00	10,00	20,00	15,5700	2,23044	4,975
Valid N (listwise)	100						

Lampiran 4 Hasil Output SPSS\_Uji Validitas

**A. Variabel Religiusitas (X1)**

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	TOTAL
X1.1	Pearson	1	,419**	,469**	,353**	,182	,569**	,391**	,548**	,353**	,681**
	Correlation										
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,070	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson	,419**	1	,429**	,313**	,241*	,603**	,361**	,462**	,220*	,348**
	Correlation										
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,002	,016	,000	,000	,000	,028	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson	,469**	,429**	1	,483**	,309**	,456**	,505**	,455**	,412**	,345**
	Correlation										
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,002	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson	,353**	,313**	,483**	1	,450**	,436**	,525**	,353**	,399**	,434**
	Correlation										
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson	,182	,241*	,309**	,450**	1	,268**	,475**	,113	,441**	,433**
	Correlation										
	Sig. (2-tailed)	,070	,016	,002	,000		,007	,000	,265	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson	,569**	,603**	,456**	,436**	,268**	1	,521**	,587**	,279**	,391**
	Correlation										
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,007		,000	,000	,005	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

X1.7	Pearson	,391**	,361**	,505**	,525**	,475**	,521**	1	,385**	,435**	,569**	,767**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
X1.8	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson	,548**	,462**	,455**	,353**	,113	,587**	,385**	1	,298**	,317**	,676**
	Correlation											
X1.9	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,265	,000	,000	,000	,003	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson	,353**	,220*	,412**	,399**	,441**	,279**	,435**	,298**	1	,637**	,662**
X1.10	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	,000	,028	,000	,000	,000	,005	,000	,003	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.10	Pearson	,353**	,348**	,345**	,434**	,433**	,391**	,569**	,317**	,637**	1	,717**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000
TOTAL	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pearson	,681**	,629**	,693**	,683**	,567**	,749**	,767**	,676**	,662**	,717**	1
	Correlation											
L	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## B. Variabel Persepsi Wajib Pajak (X2)

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	,484**	,156	,383**	,797**
	Sig. (2-tailed)		,000	,122	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,484**	1	,343**	,251*	,773**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,012	,000
	N	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,156	,343**	1	,027	,513**
	Sig. (2-tailed)	,122	,000		,793	,000
	N	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	,383**	,251*	,027	1	,606**
	Sig. (2-tailed)	,000	,012	,793		,000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	,797**	,773**	,513**	,606**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### C. Variabel Tingkat Penghasilan (X3)

		Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	,100	,362**	,297**	,453**	,227*	,712**
	Sig. (2-tailed)		,324	,000	,003	,000	,023	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	,100	1	,259**	,073	,181	,131	,402**
	Sig. (2-tailed)	,324		,009	,469	,071	,194	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	,362**	,259**	1	,338**	,451**	,095	,632**
	Sig. (2-tailed)	,000	,009		,001	,000	,349	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	,297**	,073	,338**	1	,251*	,212*	,636**
	Sig. (2-tailed)	,003	,469	,001		,012	,034	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	,453**	,181	,451**	,251*	1	,166	,662**
	Sig. (2-tailed)	,000	,071	,000	,012		,099	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	,227*	,131	,095	,212*	,166	1	,557**
	Sig. (2-tailed)	,023	,194	,349	,034	,099		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	,712**	,402**	,632**	,636**	,662**	,557**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### D. Variabel Pemutihan Pajak (X4)

		Correlations				
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	TOTAL
X4.1	Pearson Correlation	1	,222*	,284**	,402**	,697**
	Sig. (2-tailed)		,027	,004	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	,222*	1	,256*	,236*	,624**
	Sig. (2-tailed)	,027		,010	,018	,000
	N	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	,284**	,256*	1	,571**	,729**

	Sig. (2-tailed)	,004	,010		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,402**	,236*	,571**	1	,765**
X4.4	Sig. (2-tailed)	,000	,018	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,697**	,624**	,729**	,765**	1
TOTAL	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### E. Variabel Keberhasilan Penerimaan PBB (Y)

		Correlations				
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	TOTAL
	Pearson Correlation	1	,303**	,397**	,467**	,733**
Y.1	Sig. (2-tailed)		,002	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,303**	1	,324**	,300**	,650**
Y.2	Sig. (2-tailed)	,002		,001	,002	,000
	N	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,397**	,324**	1	,629**	,787**
Y.3	Sig. (2-tailed)	,000	,001		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,467**	,300**	,629**	1	,803**
Y.4	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,733**	,650**	,787**	,803**	1
TOTAL	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Lampiran 5 Hasil Output SPSS\_Uji Reliabilitas

#### A. Variabel Religiusitas (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,870	10

B. Variabel Persepsi Wajib Pajak (X2)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,613	4

C. Variabel Tingkat Penghasilan (X3)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,640	6

D. Variabel Pemutihan Pajak (X4)

**Reliability Statistics**

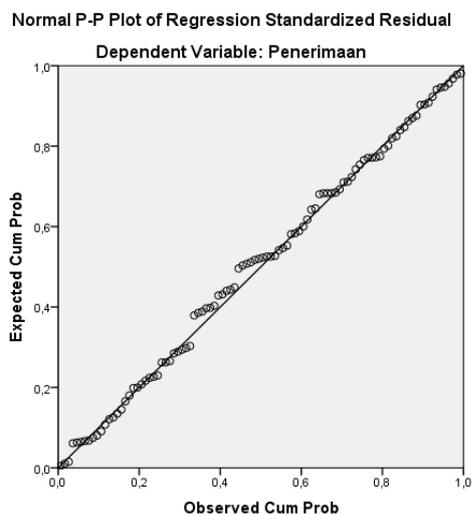
Cronbach's Alpha	N of Items
,652	4

E. Variabel Keberhasilan Penerimaan PBB (Y)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,729	4

*Lampiran 6 Hasil Output SPSS\_Uji Normalitas*



**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,75581158
	Absolute	,056
Most Extreme Differences	Positive	,031
	Negative	-,056
Kolmogorov-Smirnov Z		,558
Asymp. Sig. (2-tailed)		,915

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

*Lampiran 7 Hasil Output SPSS\_Uji Multikolinieritas*

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	2,144	1,895		1,131	,261		
	RELIGIUSITAS	,111	,041	,253	2,679	,009	,734	1,363
	PERSEPSI	-,047	,087	-,049	-,537	,593	,781	1,280
	PENGHASILAN	,123	,054	,204	2,266	,026	,804	1,243
	PEMUTIHAN	,443	,104	,385	4,253	,000	,796	1,256

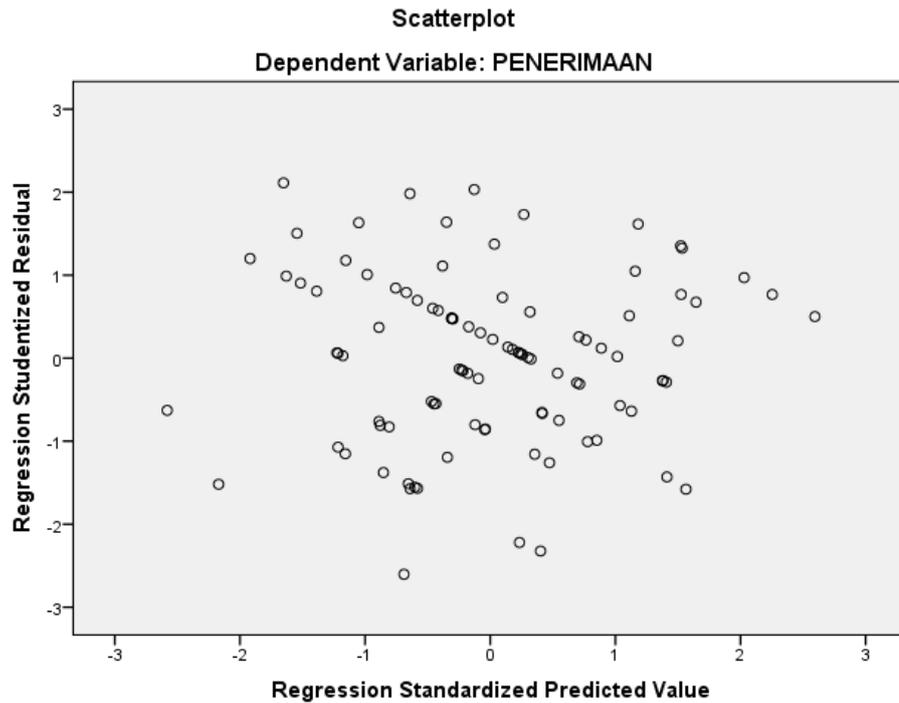
a. Dependent Variable: PENERIMAAN

*Lampiran 8 Hasil Output SPSS\_Uji Heteroskedastisitas*

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	2,653	1,103		2,405	,018		
	RELIGIUSITAS	,003	,024	,017	,144	,886	,734	1,363
	PERSEPSI	,032	,050	,071	,632	,529	,781	1,280
	PENGHASILAN	-,059	,032	-,205	-1,849	,068	,804	1,243
	PEMUTIHAN	-,043	,061	-,080	-,716	,476	,796	1,256

a. Dependent Variable: ABS\_RESIDUAL



Lampiran 9 Hasil Output SPSS\_Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,144	1,895		1,131	,261
RELIGIUSITAS	,111	,041	,253	2,679	,009
PERSEPSI	-,047	,087	-,049	-,537	,593
PENGHASILAN	,123	,054	,204	2,266	,026
PEMUTIHAN	,443	,104	,385	4,253	,000

Sumber : diolah dengan SPSS 21

Lampiran 10 Hasil Output SPSS\_Uji Koefisien Regresi Parsial (t)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,144	1,895		1,131	,261
RELIGIUSITAS	,111	,041	,253	2,679	,009
PERSEPSI	-,047	,087	-,049	-,537	,593
PENGHASILAN	,123	,054	,204	2,266	,026
PEMUTIHAN	,443	,104	,385	4,253	,000

a. Dependent Variable: PENERIMAAN

Lampiran 11 Hasil Output SPSS\_Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,617 <sup>a</sup>	,380	,354	1,79239

a. Predictors: (Constant), PEMUTIHAN, PERSEPSI, PENGHASILAN, RELIGIUSITAS

Lampiran 12 Hasil Output SPSS\_Uji Simultan F

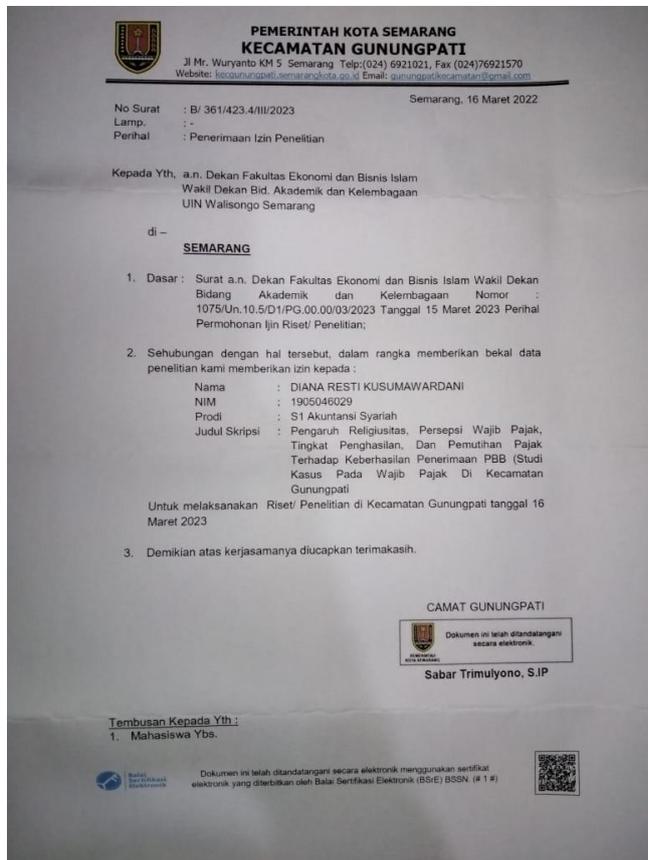
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	187,305	4	46,826	14,575	,000 <sup>b</sup>
	Residual	305,205	95	3,213		
	Total	492,510	99			

a. Dependent Variable: PENERIMAAN

b. Predictors: (Constant), PEMUTIHAN, PERSEPSI, PENGHASILAN, RELIGIUSITAS

Lampiran 13 Dokumentasi







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Diana Resti Kusumawardani  
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 07 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Patemon RT 03 RW 03 kec. Gunungpati, Semarang  
Nomor Telepon : 085866320603  
Email : [dianaresti751@gmail.com](mailto:dianaresti751@gmail.com)

### PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Pertiwi 45 Tahun 2006-2007
2. SDN Patemon 01 Tahun 2007-2013
3. SMPN 24 Semarang Tahun 2013-2016
4. SMAN 12 Semarang Tahun 2016-2019
5. UIN Walisongo Semarang Tahun 2019-2023

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. KOBİ Tahun 2019-2022
2. PMII Rayon Ekonomi Tahun 2019-2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, April 2023

Diana Resti Kusumawardani